

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN PERUSAHAAN ANAK**

**Laporan Auditor Independen
dan
Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2010 dan 2009**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERUM PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | Suwhono |
| Alamat Kantor | : | Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) | : | Jl. Masjid V No.6 RT.005 RW.005 Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat |
| Nomor Telepon | : | (021) 3901461 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Budiyanto |
| Alamat Kantor | : | Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) | : | Jl. Cipinang Jaya II No.48 RT.005 RW.007 Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur |
| Nomor Telepon | : | (021) 31924711 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ;
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Maret 2011

Direktur Utama,

Direktur Keuangan,

Suwhono

Budiyanto



Number : R/118.AGA/4.1/2011

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ABDA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi
Perusahaan Umum Pegadaian

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi Perusahaan Umum Pegadaian ("Perusahaan") dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2010, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasi adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasi Perum Pegadaian dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, diaudit oleh auditor independen lain, yang dalam laporannya bernomor LAI/GA/10011 tertanggal 10 Maret 2010 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasi bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi Perum Pegadaian dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2010 dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.o atas laporan keuangan konsolidasi, efektif 1 Januari 2010, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.50 (Revisi 2006) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No.55 (Revisi 2006) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK tersebut telah diberlakukan secara prospektif.

RSM AAJ Associates

Laporan keuangan konsolidasi terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan usahanya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti diuraikan dalam Catatan 38.b, saat ini Perusahaan masih dalam proses perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan (Persero). Sampai dengan tanggal laporan, perubahan ini masih dalam proses di Kementerian BUMN. Laporan keuangan konsolidasi terlampir tidak mencakup dampak yang berasal dari hal tersebut.



Saptoto Agustomo

Nomor Izin Akuntan Publik: 98.1.0202

Jakarta, 23 Maret 2011

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN PERUSAHAAN ANAK**

NERACA KONSOLIDASI

Per 31 Desember 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2010 Rp	2009 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	3	357.072.324.281	267.988.501.964
Pinjaman Yang Diberikan (setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 116.897.785.539 dan Nihil)	2.d, 2.e, 4	18.079.061.031.676	14.194.632.042.323
Piutang Lainnya	5	13.619.865.553	4.882.284.402
Persediaan	2.f, 6	48.904.163.073	22.573.079.022
Uang Muka	7	124.505.128.860	11.940.719.316
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2.p, 8	901.745.339.556	684.602.533.286
Beban Dibayar di Muka	2.p, 9	57.480.462.884	51.468.245.121
Pajak Dibayar di Muka	2.q, 18.a	39.396.710.924	39.396.710.924
Jumlah Aset Lancar		<u>19.621.785.026.807</u>	<u>15.277.484.116.358</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Kepada Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Setelah Dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 12.684.002.656 dan Rp 12.334.938.186)	2.c, 2.e, 10	1.082.227.864	333.377.335
Aset Pajak Tanguhan	2.q, 18.d	34.486.440.460	42.883.553.422
Aset Tetap - (Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 427.301.649.542 dan Rp 350.904.154.420)	2.g, 11	508.413.736.219	472.020.220.242
Aset Lain-lain	2.h, 2.i, 2.j, 12	117.275.411.376	66.742.860.897
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>661.257.815.919</u>	<u>581.980.011.897</u>
JUMLAH ASET		<u>20.283.042.842.726</u>	<u>15.859.464.128.255</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN PERUSAHAAN ANAK
NERACA KONSOLIDASI (Lanjutan)**
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2010 Rp	2009 Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Pinjaman Bank	13	13.070.484.120.221	9.252.231.284.097
Pinjaman Obligasi Yang Akan Jatuh Tempo			
Dalam Waktu Satu Tahun	2.l, 1, 14, 20	336.139.920.968	269.143.928.562
Pinjaman Lainnya	15	15.000.000.000	15.000.000.000
Hutang Kepada Rekanan	16	29.163.829.278	19.364.716.773
Hutang Kepada Nasabah	17	64.454.806.979	60.005.937.156
Hutang Pajak	2.q, 18.b	89.327.407.847	40.745.496.192
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2.p, 19	75.253.902.705	63.806.060.822
Pendapatan Diterima di Muka	2.p, 22	5.160.963.403	3.620.163.016
Hutang Lancar Lainnya	23	160.174.831.848	118.168.883.029
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>13.845.159.783.249</u>	<u>9.842.086.469.647</u>
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Pinjaman Obligasi - Setelah Dikurangi Bagian			
Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	2.m, 1, 14, 20	2.657.440.706.486	2.991.560.651.602
Pinjaman dari Pemerintah			
Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	21	410.000.000.000	410.000.000.000
Pinjaman Dari Pemerintah Daerah	21	--	1.350.000.000
Pendapatan Ditangguhkan	2.p, 22	22.788.383.526	24.425.872.162
Kewajiban Estimasi Untuk Imbalan Kerja	2.o, 24	51.451.021.640	50.582.947.711
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		<u>3.141.680.111.652</u>	<u>3.477.919.471.475</u>
EKUITAS	25		
Modal Awal		205.000.000.000	205.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah		46.252.000.000	46.252.000.000
Saldo Laba:			
- Ditetapkan Penggunaannya	25.a	1.865.162.562.133	1.490.010.668.212
- Belum Ditetapkan Penggunaannya	25.b	1.179.788.385.692	798.195.518.921
Jumlah Ekuitas		<u>3.296.202.947.825</u>	<u>2.539.458.187.133</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u><u>20.283.042.842.726</u></u>	<u><u>15.859.464.128.255</u></u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2010 Rp	2009 Rp
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Sewa Modal	2.d, 2.p, 26	4.887.100.269.659	3.609.785.546.341
Pendapatan Administrasi	2.d, 2.p, 27	481.863.510.920	405.281.061.094
		<u>5.368.963.780.579</u>	<u>4.015.066.607.435</u>
Pendapatan Usaha Lainnya:			
Pendapatan Lainnya	2.p, 28	9.329.126.007	2.036.545.093
		<u>9.329.126.007</u>	<u>2.036.545.093</u>
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>5.378.292.906.586</u>	<u>4.017.103.152.528</u>
BEBAN USAHA			
Bunga dan Provisi	2.p, 29	1.573.453.742.911	1.347.960.331.708
Penyusutan Aktiva Tetap	2.g, 2.p, 30	79.859.739.674	52.130.492.608
Pegawai	2.p, 31	1.328.788.645.238	1.007.927.772.767
Umum	2.p, 32	845.682.926.556	541.329.652.080
		<u>3.827.785.054.379</u>	<u>2.949.348.249.163</u>
Jumlah Beban Usaha		<u>3.827.785.054.379</u>	<u>2.949.348.249.163</u>
LABA USAHA		<u>1.550.507.852.207</u>	<u>1.067.754.903.365</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Uang Kelebihan Lewat Waktu	2.p, 17	23.658.824.171	19.283.738.489
Pendapatan Sewa Gedung	2.p, 33	3.489.966.147	3.596.936.674
Pendapatan Jasa Giro	34	1.336.541.145	1.199.186.839
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap	2.g, 35, 11	(134.523.087)	583.803.400
Pendapatan Lainnya	2.p, 36.a	39.637.200.190	28.860.477.721
Beban Lain-lain	2.p, 36.b	(1.769.061.119)	(5.031.974.928)
Jumlah Pendapatan Lain-lain		<u>66.218.947.447</u>	<u>48.492.168.195</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		<u>1.616.726.799.654</u>	<u>1.116.247.071.559</u>
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN			
Tahun Berjalan	2.q, 18.c	428.541.301.000	318.209.384.080
Tangguhan	18.d	8.397.112.962	(157.831.442)
Jumlah Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		<u>436.938.413.962</u>	<u>318.051.552.638</u>
LABA BERSIH		<u><u>1.179.788.385.692</u></u>	<u><u>798.195.518.921</u></u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Modal Awal Rp	Penyertaan Modal Pemerintah Rp	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas Rp
				Ditentukan Penggunaannya Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya Rp	
Saldo per 31 Desember 2008		205.000.000.000	46.252.000.000	1.059.199.340.092	633.548.328.120	1.943.999.668.212
Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan						
Dana Pembangunan Semesta		--	--	--	(190.065.000.000)	(190.065.000.000)
Dana Program Kemitraan		--	--	--	(6.336.000.000)	(6.336.000.000)
Dana Bina Lingkungan		--	--	--	(6.336.000.000)	(6.336.000.000)
Cadangan Umum		--	--	338.186.328.120	(338.186.328.120)	--
Cadangan Tujuan		--	--	92.625.000.000	(92.625.000.000)	--
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	25b	--	--	430.811.328.120	(633.548.328.120)	(202.737.000.000)
Laba Bersih Tahun 2009	25b	--	--	--	798.195.518.921	798.195.518.921
Saldo per 31 Desember 2009		205.000.000.000	46.252.000.000	1.490.010.668.212	798.195.518.921	2.539.458.187.133
Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan						
Pembagian Dividen		--	--	--	(399.097.760.000)	(399.097.760.000)
Dana Program Kemitraan		--	--	--	(15.963.910.000)	(15.963.910.000)
Dana Bina Lingkungan		--	--	--	(7.981.955.000)	(7.981.955.000)
Cadangan Umum		--	--	232.948.893.921	(232.948.893.921)	--
Cadangan Tujuan		--	--	142.203.000.000	(142.203.000.000)	--
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	25b	--	--	375.151.893.921	(798.195.518.921)	(423.043.625.000)
Laba Bersih Tahun 2010	25b	--	--	--	1.179.788.385.692	1.179.788.385.692
Saldo per 31 Desember 2010		205.000.000.000	46.252.000.000	1.865.162.562.133	1.179.788.385.692	3.296.202.947.825

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2010 Rp	2009 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari:			
- Penerimaan Sewa Modal		4.607.605.209.689	3.442.305.804.660
- Pendapatan Administrasi	2e,2p,28	504.554.490.606	405.281.061.094
- Pendapatan Lainnya		38.113.975.806	33.021.284.471
- Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan		57.681.172.259.924	43.039.053.559.424
- Pelunasan dari Piutang Lainnya		92.840.761.097	130.208.660.967
- Penjualan BSL/BLP & Aset yang Disisihkan		595.475.618.792	585.402.591.554
- Penerimaan Hutang Nasabah		225.691.638.592	102.602.548.025
- Penerimaan Hutang Pajak		112.246.788.655	86.682.537.194
- Penerimaan Hutang Lainnya		191.571.597.612	288.249.207.801
Jumlah Penerimaan Kas Dari Aktivitas Operasi		<u>64.049.272.340.773</u>	<u>48.112.807.255.190</u>
Pengeluaran Kas untuk:			
- Pembayaran Bunga Bank/Obligasi		(1.569.981.778.033)	(1.368.011.167.993)
- Beban Pegawai		(1.148.744.652.952)	(1.006.706.968.039)
- Beban Umum		(986.370.451.380)	(515.152.143.074)
- Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan		(62.266.830.047.156)	(48.361.531.976.156)
- Pembayaran Hutang Kepada Rekanan		(1.040.400.227)	(4.700.967.950)
- Pembayaran Hutang Kepada Nasabah		(60.521.605.579)	(66.570.159.238)
- Pembayaran Hutang Pajak		(492.206.178.000)	(512.137.682.015)
- Pembayaran Hutang Lainnya		(282.833.997.249)	(243.605.682.240)
- Pemberian Piutang		(87.946.501.746)	(180.336.639.786)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Operasi		<u>(66.896.475.612.322)</u>	<u>(52.258.753.386.491)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>(2.847.203.271.549)</u>	<u>(4.145.946.131.301)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Kas dari:			
- Penjualan Aset Tetap	2h,36,12	34.499.700	584.803.400
Jumlah Penerimaan Kas Dari Aktivitas Investasi		<u>34.499.700</u>	<u>584.803.400</u>
Pengeluaran Kas untuk:			
- Pembelian Aset Tetap		(68.056.616.958)	(130.886.057.368)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Investasi		<u>(68.056.616.958)</u>	<u>(130.886.057.368)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(68.022.117.258)</u>	<u>(130.301.253.968)</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Catatan	2010 Rp	2009 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Kas dari:		
- Hutang Bank	9.711.407.975.347	12.223.523.160.244
- Hutang <i>Revolving Underwriting Facility</i>	--	371.915.000.000
- Hutang Obligasi	--	1.500.000.000.000
- Hutang Jangka Panjang Lainnya	--	100.000.000
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>9.711.407.975.347</u>	<u>14.095.538.160.244</u>
Pengeluaran Kas untuk:		
- Angsuran Hutang Bank	(5.893.155.139.223)	(9.176.959.478.862)
- Pembayaran Biaya Emisi Obligasi	--	(3.801.451.381)
- Pelunasan Obligasi		
Obligasi IX Seri A	(211.000.000.000)	--
Obligasi IX seri C	(2.000.000.000)	--
Obligasi IX seri B	(13.050.000.000)	(8.700.000.000)
Obligasi IX seri D	(43.500.000.000)	--
- Pelunasan Hutang <i>Revolving Underwriting Facility</i>	--	(371.915.000.000)
- Pelunasan Hutang Jangka Panjang Lainnya	(1.350.000.000)	--
- Pembayaran Dana Pembangunan Semesta	--	(190.065.000.000)
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2009	(399.097.760.000)	--
- Pembayaran Uang Muka Dividen Tahun Buku 2010	(120.000.000.000)	--
- Pembayaran Program Kemitraan	(15.963.910.000)	(6.336.000.000)
- Pembayaran Program Bina Lingkungan	(7.981.955.000)	(6.336.000.000)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(6.707.098.764.223)</u>	<u>(9.764.112.930.243)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>3.004.309.211.124</u>	<u>4.331.425.230.001</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	89.083.822.317	55.177.844.732
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	267.988.501.964	212.810.657.232
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u>357.072.324.281</u>	<u>267.988.501.964</u>
Kas dan Bank terdiri dari:		
Kas	229.096.974.634	168.498.282.683
Bank	127.975.349.647	99.490.219.281
Jumlah	<u>357.072.324.281</u>	<u>267.988.501.964</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a Pendirian

Pegadaian (selanjutnya Perusahaan) adalah suatu lembaga perkreditan, berdiri sejak jaman penjajahan Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 178 tanggal 3 Mei 1961 Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, sebagai badan usaha negara di bawah naungan Departemen Keuangan. Dengan terbitnya Inpres No.17 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969, PN Pegadaian beralih statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan PP No.103 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000, Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan usahanya adalah penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan bertujuan untuk:

- Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai
- Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia (kepercayaan), pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Selain penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, Perusahaan menjalankan usaha jasa gadai syariah (Rahn), sejak tanggal 10 Januari 2003.

Perusahaan berkantor pusat di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta, dengan 13 Kantor Wilayah, 712 Kantor Cabang Konvensional, 157 Kantor Cabang Syariah, dan 4.051 Unit Pelayanan Cabang (UPC) dan Unit Pelayanan Syariah (UPS) diseluruh Indonesia per 31 Desember 2010. Per 31 Desember 2009, Perusahaan memiliki 13 kantor wilayah, 690 Kantor Cabang Konvensional, 99 Kantor Cabang Syariah, dan 2.508 UPC dan UPS di seluruh Indonesia.

Berdasarkan neraca pembukaan Perusahaan dan Surat Menteri Keuangan RI No.1015/KMK.013/ 1991 tanggal 26 September 1991, modal awal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 205.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam Neraca Pembukaan. Modal awal yang disetor Pemerintah tersebut adalah kumulatif laba bersih yang diperoleh Perjan Pegadaian. Secara bertahap mulai tahun 1991, Pemerintah Republik Indonesia memberikan tambahan modal sebagai Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp 46.252.000.000 melalui SK Menteri Keuangan RI masing-masing sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Rp
0360/KM.3-42/SKOP/0391	30 Maret 1991	20.000.000.000
0136/KM.3-42/SKOP/0891	5 Agustus 1991	16.252.000.000
0151/MK.013/1992	29 Juni 1992	10.000.000.000
Jumlah		46.252.000.000

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
 (Dalam Rupiah Penuh)

1.b Penawaran Umum Efek Perusahaan

Perusahaan telah menerbitkan emisi obligasi sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 tahun untuk obligasi tahun 1993, 1998, 2001 dan 2009 (Seri A), jangka waktu 8 tahun untuk obligasi tahun 1999, 2000, 2002, 2003 (Seri A) dan 2009 (Seri B) dan jangka waktu 15 tahun untuk obligasi tahun 2003 Seri B serta jangka waktu 10 tahun untuk obligasi tahun 2006, 2007 dan 2009 (Seri C).

Seluruh obligasi dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
1993	Obligasi I	11 Juni 1993 & 9 Juli 1998	50 milyar	Bunga 17,5% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang.
1994	Obligasi II	30 Juni 1994 & 18 Juli 1999	25 milyar	Bunga 13% tetap untuk 6 bulan pertama, selanjutnya mengambang yaitu 1% di atas tingkat bunga deposito 6 bulan bank pemerintah.
1996	Obligasi III	25 Juni 1996 & 12 Juli 2001	100 milyar	Bunga 17,75% tetap untuk tahun pertama, 4 tahun berikutnya mengambang 1,5 % di atas tingkat bunga deposito bank pemerintah & swasta.
1997	Obligasi IV	16 Juni 1997 & 3 Juli 2002	100 milyar	Bunga 14,75% tetap untuk tahun pertama, 4 tahun berikutnya mengambang 1% diatas tingkat bunga deposito bank pemerintah dan swasta.
1998	Obligasi V	23 Juni 1998 & 8 Juli 2003	64,6 milyar	Bunga Seri A1 49% tetap untuk tahun pertama, seterusnya mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium. Bunga Seri B2 mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium.
1999	Obligasi VI	24 Agt 1999 & 8 Sept 2007	135 milyar	Bunga 15,5% tetap untuk tahun pertama, 7 tahun berikutnya mengambang sebesar 1,75% di atas tingkat bunga rata-rata JIBOR 6 bulan.
2000	Obligasi VII	27 Juni 2000 & 21 Juli 2008	150 milyar	Bunga 15,625% tetap untuk tahun pertama, berikutnya mengambang 1,725% di atas tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah.
2001	Obligasi VIII	31 Mei 2001 & 12 Juni 2006	300 milyar	Bunga Seri A 19,25% tetap, cicilan 20% pokok per tahun Seri B 19,25% tetap, Seri C 0,50% tetap menurun per tahun 20,25% untuk tahun pertama, Seri D 19,25% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang sesuai dengan tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, maksimal 24,25% minimal 16,25%, Seri E 19,25% tetap untuk tahun pertama sampai tahun ketiga, selanjutnya mengambang sesuai tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, maksimal 24,25% minimal 16,25%.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
2002	Obligasi IX	24 Mei 2002 & 6 Juni 2010	300 milyar	Bunga Seri A 18,25% tetap per tahun, Seri B 18,25% per tahun, amortisasi 10% tahun keempat emisi, 20% tahun kelima sampai dengan ketujuh 30% tahun kedelapan emisi, Seri C 18,25% tetap tahun Pertama, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% per tahun, maksimal 20,00% minimal 16,50%. Seri D dengan opsi jual pada tahun kelima, 18,25% tetap tahun pertama sampai dengan tahun kelima, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% per tahun, maksimal 20,00%, minimal 16,50%.
2003	Obligasi X	27 Juni 2003, 11 Juli 2011 & 2018	400 milyar	Bunga Seri A 12,9375% tetap per tahun dengan jangka waktu 8 tahun, Seri B dengan jangka waktu 15 tahun dengan tingkat bunga 13,125% per tahun tetap untuk tahun pertama sampai dengan ke tiga, selanjutnya tahun ke empat dan sampai dengan ke tahun kelima belas mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 3 bulan ditambah premi 1,0% per tahun maksimum 15,50%, minimum 10,50%.
2006	Obligasi XI	23 Mei 2006 & 23 Mei 2016	500 milyar	Bunga Seri A 13,10% per tahun tetap, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 13,10% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1,25% per tahun, maksimum 16,00%, minimum 10,00%.
2007	Obligasi XII	4 September 2007 & 2017	600 milyar	Bunga Seri A 10,025% per tahun tetap, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 10,025% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1% per tahun, maksimum 12,00%, minimum 8,00%.
2009	Obligasi XIII	1 Juli 2009, 2014, 2017 & 2019	1.500 milyar	Seri A1, tingkat bunga tetap 11,675% pertahun untuk tahun pertama sampai tahun ke-5. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp 350 miliar. Seri A2, tingkat bunga tetap 11,675% per tahun untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun ke-2 sampai tahun ke-5 yang besarnya berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah premi 3% per tahun dengan batas atas 13% dan batas bawah 10%. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp100 miliar. Seri B, tingkat bunga tetap 12,650% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun ke 8. Jangka waktu 8 tahun dengan jumlah Rp 650 miliar. Seri C, tingkat bunga tetap 12,875% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh. Jangka waktu 10 tahun dengan jumlah Rp 400 miliar.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada tanggal 18 Pebruari 2010 yang telah diaktakan dalam Akta No.19 tanggal 18 Pebruari 2010 oleh notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH mengenai pengunduran diri PT Bank BNI Tbk selaku wali amanat Obligasi serta pergantian wali amanat yaitu mengganti PT Bank BNI Tbk dengan PT Bank Mega Tbk.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

1.c Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Manajemen Perusahaan terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas:

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-121/MBU/2010 tanggal 8 Juli 2010, susunan Dewan Pengawas tahun 2010 terdiri dari:

Ketua	:	Cecep Sutiawan
Anggota	:	Raksaka Mahi
Anggota	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Wiranto

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-185/MBU/2008 tanggal 11 September 2009 susunan Dewan Pengawas tahun 2009 terdiri dari:

Ketua	:	Bambang Prayitno
Anggota	:	Raksaka Mahi
Anggota	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Wiranto

Dewan Direksi :

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-74/MBU/2008 tanggal 28 April 2008, susunan Dewan Direksi tahun 2010 dan 2009 ditetapkan sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Chandra Purnama*
Direktur Pengembangan Usaha	:	Wasis Djuhar
Direktur Operasi	:	Moch. Edy Prayitno
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Sumanto Hadi
Direktur Keuangan	:	Budiyanto*

* Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-237/MBU/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Umum Pegadaian dan Keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No. KP-06/DP/GD/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian; jabatan Direktur Utama digantikan oleh Sdr. Budiyanto, Direktur Keuangan Perum Pegadaian.

Komite Audit:

Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengawas, Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian sebagai berikut:

- No.Kep-01/KP/DP/GD/2004 tanggal 1 Nopember 2004;
- No.Kep-01/KP/DP/GD/2005 tanggal 31 Oktober 2005;
- No.01/KP/DP/GD/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
- No.05/KP/DP/GD/2007 tanggal 31 Oktober 2007

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tahun 2010, berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No.KEP-01/KP/DP/GD/2010 tanggal 8 Januari 2010, susunan Komite Audit tahun 2010 terdiri dari:

Ketua	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Syahrir Ika
Anggota	:	M. Iskandar

Pada tahun 2009, berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No. Kep-05/KP/DP/GD/2007, jo Kep-01/KP/DP/GD/2009 tanggal 1 April 2009 dan jo Kep-07/KP/DP/GD/2009 tanggal 6 Oktober 2009, susunan Komite Audit tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Muhamad Nur Sodik, Ak
Anggota	:	M. Iskandar

Komite Manajemen Risiko:

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No.KEP-03/KP/DP/GD/2010 tanggal 8 Januari 2010, susunan Komite Manajemen Risiko tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Suhadi Hadiwijoyo
Anggota	:	Muhamad Nur Sodik, Ak

Dewan Pengawas Syariah:

Dalam rangka mengefektifkan pengawasan kegiatan usaha gadaai syariah yang telah beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.227/US.1.00/2004 tanggal 30 Nopember 2004, telah dibentuk Dewan Pengawas Syariah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Anggota	:	Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH
Anggota	:	H. Rahmat Hidayat, SE, MT

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 183/US1.00/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perpanjangan Masa Tugas Dewan Pengawas Syariah Perum Pegadaian, tugas Dewan Pengawas Syariah Perum Pegadaian telah diperpanjang selama 3 tahun.

Selanjutnya berdasarkan Surat Direksi No. 77/US1.00/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Perum Pegadaian yang berakhir pada 5 Oktober 2009 tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dikeluarkannya keputusan mengenai pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Syariah yang baru secara pasti untuk masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi Perum Pegadaian No.306/US.1.00/2010 tanggal 9 Desember 2010 susunan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Anggota	:	Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH.
Anggota	:	Dr. H. M. Cholil Nafis, Lc, MA.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Audit selama tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Direksi	16.728.957.279	4.221.690.067
Dewan Pengawas, Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko	<u>8.383.571.839</u>	<u>1.884.100.000</u>
Jumlah	<u>25.112.529.118</u>	<u>6.105.790.067</u>

Karyawan:

Jumlah karyawan Perum Pegadaian per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebanyak 7.796 dan 6.635 orang sedangkan jumlah karyawan anak perusahaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebanyak nihil dan 3 orang.

1.d Anak Perusahaan

Sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000 dan Akta Notaris Zacharias Omawele, SH No.13 tanggal 26 Juli 2000, Perusahaan memiliki secara langsung penyertaan saham pada Anak Perusahaan yaitu PT Balai Lelang Artha Gasia (BLAG) sebesar 99,99% yang bergerak di bidang jasa lelang dan berlokasi di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta. BLAG mulai beroperasi secara komersial sejak bulan September tahun 2000 dan memiliki total aset sebesar Rp 5.135.486 dan Rp 193.755.459 per 31 Desember 2010 dan 2009.

Pada tahun 2010, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2010, para pemegang saham memutuskan membekukan kegiatan operasional perseroan terkait dengan penurunan omzet yang relatif permanen dan ruang gerak usaha yang semakin sempit, melakukan restrukturisasi kepengurusan dan menyelesaikan hak dan kewajiban perseroan termasuk masalah sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

2.a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan konsolidasi dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan berdasarkan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan No. VIII.G.7 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) serta ketentuan internal Perusahaan, terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 01A/AK.0.0012.0/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Kebijakan Kode Perkiraan Perum Pegadaian yang diberlakukan mulai 1 Januari 2008 dan disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Direksi No.321A/AK.2.0012.2/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang perubahan nama perkiraan dan penambahan kode perkiraan yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2010.

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasi disajikan dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basic*), kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung (*direct method*) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

2.b. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung atau Perusahaan dapat mengendalikan investasi tersebut.

Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset bersih dari anak perusahaan yang tidak dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Porsi kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset bersih anak perusahaan jumlahnya tidak signifikan (0,01%), oleh karena itu untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan tidak menyajikan porsi kepemilikan minoritas.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansi yang disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi dan saldo antara Perusahaan dan anak perusahaan telah dieliminasi. Penyajian laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha.

2.c. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 adalah:

- a). Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (*holding companies, subsidiaries, fellow subsidiaries*).
- b). Perusahaan asosiasi (*associated company*).
- c). Perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor).
- d). Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan manajer dari perusahaan dan keluarga dekat orang-orang tersebut.
- e). Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam alinea c) dan d) diatas atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama dari perusahaan pelapor adalah manajemen kunci yang sama dengan manajemen perusahaan pelapor.

Piutang Kepada Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa pada Laporan Keuangan Konsolidasi, seluruhnya berasal dari Piutang TGR (Tuntutan Ganti Rugi) karyawan kunci di Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.d. Pinjaman Yang Diberikan

Mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah, maka untuk mempermudah administrasi dilakukan penggolongan Uang Pinjaman (UP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu:

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Pinjaman Usaha Gadai

Pinjaman yang diberikan dikelompokkan sesuai dengan besarnya pinjaman (pagu kredit), masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat keputusan Direksi No.349/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Sewa Modal, yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.1024/UI.I.00211/2006 tanggal 29 Desember 2006 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan diubah kembali dengan surat keputusan Direksi No. 56/UI.I.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Pebruari 2008 tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal				Jangka Waktu kredit
		2010		2009		
		Per 15 hari	Maksimum	Per 15 hari	Maksimum	
A	20.000-150.000	0,75%	6,00%	0,75%	6,00%	120 hari
B	151.000- 500.000	1,20%	9,60%	1,20%	9,60%	120 hari
C1	505.000-1.000.000	1,30%	10,40%	1,30%	10,40%	120 hari
C2	1.010.000-20.000.000	1,30%	10,40%	1,30%	10,40%	120 hari
D1	20.050.000-50.000.000	1,00%	8,00%	1,00%	8,00%	120 hari
D2	50.100.000-200.000.000	1,00%	8,00%	1,00%	8,00%	120 hari

Selama tahun 2010 Perusahaan tidak melakukan penyesuaian tarif sewa modal.

Selain pengenaan sewa modal, kepada nasabah dikenakan biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.348/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, setiap pemberian kredit dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

No	Golongan Pinjaman	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	AKN	1 % dari Uang Pinjaman
2	AK	1 % dari Uang Pinjaman
3	AG	1 % dari Uang Pinjaman
4	BK	1 % dari Uang Pinjaman
5	BG	1 % dari Uang Pinjaman
6	CK.1	1 % dari Uang Pinjaman
7	CG.1	1 % dari Uang Pinjaman
8	C.2	1 % dari Uang Pinjaman
9	D.1 dan D.2	1 % dari Uang Pinjaman
10	D.1 dan D.2 Mobil	1 % dari UP, Minimum Rp 50.000

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.312/UL.3.00213/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan Surat Edaran Direksi No. 32/UL.3.00212/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Perubahan Tarif Biaya Administrasi Ulang Gadai yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2007, pengenaan biaya administrasi dibedakan antara gadai baru dan ulang gadai sebagai berikut:

Gadai baru

No.	Kredit Lama Berlanjut	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	Semua Golongan (A,B,C dan D)	1 % dari Uang Pinjaman
2	Khusus Barang Jaminan Mobil	1 % dari uang pinjaman Minimum Rp 50.000

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Ulang Gadai		
No.	Kredit Lama Berlanjut	Tarip Biaya Administrasi (Rp)
1	1 - 30 hari	0,2 % dari Uang Pinjaman
2	31 - 60 hari	0,4 % dari Uang Pinjaman
3	61 - 90 hari	0,6 % dari Uang Pinjaman
4	91 - 120 hari	0,8 % dari Uang Pinjaman

Berdasarkan SE No.49/OP.1.00211/2004 tanggal 11 Oktober 2004, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, terakhir berdasarkan SE No. 06/UL.1.00211/2008, tanggal 30 Januari 2008 sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran
A	20.000-150.000	95%
B	151.000- 500.000	92%
C1	505.000-1.000.000	91%
C2	1.010.000-20.000.000	91%
D1	20.050.000-50.000.000	93%
D2	50.100.000-200.000.000	93%

Usaha Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.91/US.1.00/2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang Perubahan Prosentase Marhun Bih terhadap taksiran ditetapkan sebagai berikut:

Golongan	Plafon Marhun Bih	Tarip Biaya Administrasi	Jangka Waktu Kredit
	Rp	Rp	
A	20.000 - 150.000	1.000	120 hari
B	151.000 - 500.000	5.000	120 hari
C1	501.000 - 1.000.000	8.000	120 hari
C2	1.005.000 - 5.000.000	16.000	120 hari
C3	5.010.000 - 10.000.000	25.000	120 hari
C4	10.050.000 - 20.000.000	40.000	120 hari
D1	20.100.000 - 50.000.000	50.000	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	60.000	120 hari

Besar Prosentase Marhun Bih terhadap nilai taksiran adalah sebagai berikut:

Gol	Marhun Bih	% Marhun Bih		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	20.000 -150.000	95%	95%	95%
B	151.000 - 500.000	92%	92%	92%
C1	501.000 - 1.000.000	91%	91%	91%
C2	1.005.000 - 5.000.000	91%	91%	91%
C3	5.010.000 - 10.000.000	91%	91%	91%
C4	10.050.000 - 20.000.000	91%	91%	91%
D1	20.100.000 - 50.000.000	93%	93%	93%
D2	50.100.000 - 200.000.000	93%	93%	93%

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Tarif Ijarah

Berdasarkan SK Direksi No.08/US.1.00/2008 tanggal 12 Maret 2008, rumusan tarif ijarah untuk produk Rahn adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksiran/ Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu/ 10
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga	Taksiran/ Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu/ 10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran/ Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu/ 10

Diskon Ijarah:

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Muqasah (Diskon) X Tarif	Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik & Alat RT	Kendaraan Bermotor
≥ 85% x Taksiran / Estimasi	0%	80	85	90
80% - 84% x Taksiran / Estimasi	7%	74	79	84
75% - 79% x Taksiran / Estimasi	14%	69	73	77
70% - 74% x Taksiran / Estimasi	20%	64	68	72
65% - 69% x Taksiran / Estimasi	26%	59	63	67
60% - 64% x Taksiran / Estimasi	32%	54	58	61
55% - 59% x Taksiran / Estimasi	38%	50	53	56
50% - 54% x Taksiran / Estimasi	44%	45	48	50
45% - 49% x Taksiran / Estimasi	50%	40	43	45
40% - 44% x Taksiran / Estimasi	56%	35	37	40
35% - 39% x Taksiran / Estimasi	61%	31	33	35
30% - 34% x Taksiran / Estimasi	66%	27	28	31
25% - 29% x Taksiran / Estimasi	71%	23	25	26
20% - 24% x Taksiran / Estimasi	76%	19	20	22
15% - 19% x Taksiran / Estimasi	81%	15	16	17
10 - 14% x Taksiran / Estimasi	85%	Tarif khusus = (1% x Taksiran) per 120 hari		
< 10% x Taksiran / Estimasi	80%	Tarif khusus = (1% x Taksiran) per 120 hari		

Usaha Lain

Kredit Kreasi

Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Krasida adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Besaran uang pinjaman Kredit Kreasi berdasarkan Surat Edaran Direksi No.61/US.2.00/2006 tanggal 13 Desember 2006 maksimum kredit kreasi sebesar Rp100.000.000 per nasabah, sedangkan Krasida terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.190/US.2.00/2006 tanggal 28 September 2006, batas minimum uang pinjaman kredit krasida sebesar Rp 20.000.000 per nasabah.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
 (Dalam Rupiah Penuh)

Secara umum Kreasi dan Krasida mempunyai kemiripan dalam hal pelaksanaan operasionalnya yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Kreasi	Krasida
1	Tujuan Kredit	Produktif	Produktif
2	Waktu Pelayanan	3 hari	1-2 jam
3	Tarif Sewa Modal	12% / tahun flat	12% / tahun flat
4	Biaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman	1% dari Uang Pinjaman
5	Biaya Lainnya	Notaris, akta fidusia, cek fisik, asuransi, materai	Materai dan cek fisik untuk kendaraan bermotor
6	Jenis Barang Jaminan (BJ)	BPKB kendaraan bermotor	Perhiasan emas dan kendaraan bermotor
7	Penyimpanan BJ	Dipakai nasabah untuk alat produksi	Disimpan di Pegadaian
8	Besarnya Pinjaman	70% dari nilai agunan	95% dari nilai agunan
9	Jangka Waktu Kredit	12 - 36 bulan	12 - 36 bulan
10	Cara Pelunasan	Angsuran tetap	Angsuran Tetap

Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Krista adalah pinjaman (Kredit) dalam jangka waktu maksimum 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada usaha rumah tangga sangat mikro (gurem) yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja.

Besaran uang pinjaman Kredit Krista berdasarkan Surat Edaran Direksi No.91/UL.2.00.22.2/2008 tanggal 24 Desember 2008 maksimum kredit Krista Rp 5.000.000, terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.65/UL.2.00.22.2/2009 tanggal 24 Agustus 2009, batas maksimum uang pinjaman kredit Krista sebesar Rp 8.000.000 per nasabah. Secara umum pelaksanaan operasional Krista sebagai berikut:

No	Uraian	Krista
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 3 hari
3	Tarif Sewa Modal	10,80% / Tahun Flat
4	Biaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman
5	Biaya Lainnya	Asuransi, Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Alat-alat Produksi, Alat Rumah Tangga, Elektronik
7	Penyimpanan Barang Jaminan	Dipergunakan Nasabah untuk Alat Produksi atau Operasional Usaha
8	Besarnya Pinjaman	Berdasarkan Kelayakan Usaha dengan Minimal Uang Pinjaman Rp 100 ribu sampai dengan Maksimum Rp 3 juta untuk Nasabah Biasa, Nasabah <i>Roll Over</i> maksimum Rp 8 juta dan Disyaratkan Mempunyai Agunan Minimal 20% dari Pinjaman
8	Jangka Waktu Kredit	12 , 24, dan 36 Bulan
9	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)

Kremada adalah kredit yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang hanya dimanfaatkan untuk perumahan yang mencakup perbaikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan lingkungan perumahan. Dana berasal dari Pemerintah (Kementerian Negara Perumahan Rakyat). Penyaluran Kredit ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 062/UL.2.00.22.2/2006, tanggal 7 Desember 2006, tentang Penyaluran Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA).

Berikut adalah skema KREMADA:

No	Uraian	Unit Gadai efek
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1-2 Minggu
3	Tarif Sewa Modal	0%
4	Biaya Administrasi	9% per tahun dari Uang Pinjaman.
5	Biaya Lainnya	Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Tanpa Barang Jaminan
7	Plafon Pinjaman	Perbaikan Rp 5.000.000,- Pembangunan Rp 10.000.000,-
8	Nasabah	MBR yang Berkelompok
9	Jangka Waktu Kredit	Perbaikan 12 Bulan Pembangunan 24 bulan

Kredit Kresna (Kredit Serba Guna)

Kresna atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/ karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

Besar pinjaman disesuaikan dengan jumlah penghasilan masing-masing pegawai (kemampuan mengangsur) sehingga tidak terlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai, sedangkan jangka waktu kredit maksimum 36 bulan. Batas maksimum Uang Pinjaman dan jangka waktu kredit diatur oleh SK Direksi No.213/US.2.00/2006, tanggal 29 Nopember 2006.

Adapun tingkat bunga pinjaman adalah 12 % per tahun flat. Tarif sewa modal Kresna ditetapkan melalui SK Direksi No. 212/US.2.00/2006, tanggal 29 Nopember 2006.

SK Direksi No. 13/UL.3.00.22.3/03 tanggal 26 Januari 2004 ditetapkan Biaya Administrasi Kresna sebesar 0,5% dari Pinjaman, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2004.

Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG)

Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG) merupakan kredit yang diberikan kepada petani atas dasar hukum gadai melalui agen-agen yang ditunjuk Perum Pegadaian dengan barang jaminan berupa gabah kering giling. Tujuan pemberian KTJG adalah untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melakukan pengolahan sawahnya mengingat belum diperolehnya dana dari hasil penjualan produk gabah yang sengaja ditunda penjualannya sambil menunggu kenaikan harga gabah yang cenderung menurun setelah panen.

Unit Gadai Efek

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/UL.3.0022.3/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Unit Gadai Efek, telah dibentuk unit usaha baru yang bergerak di bidang pelayanan gadai dengan Barang Jaminan Saham/Efek. Unit usaha baru ini berkedudukan di Kantor Pusat Perum Pegadaian, Jl. Kramat Raya No. 162 Jakarta.

SK Direksi No. 44A/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Penyaluran Kredit Gadai Saham, ditetapkan jenis saham yang dapat dijamin, yaitu saham dalam kelompok LQ45 yang telah melalui prose Know Your Customer (KYC).

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

SK Direksi No. 44B/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Prosedur Operasional Kredit Gadai Saham, ditetapkan berlakunya Pedoman Operasional Kredit Gadai Saham.

SK Direksi No. 44C/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Tarif sewa modal dan Biaya Administrasi, ditetapkan tarif Sewa Modal secara fixed Rate. Tarif SM ditetapkan melalui Surat Edaran. Sedangkan Biaya Administrasi ditetapkan sebesar 0,125% per jangka waktu 90 hari.

SK Direksi No. 44D/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Batas Maksimum dan Minimum Uang Pinjaman, ditetapkan bahwa minimum UP adalah 50 Juta Rupiah dan maksimum sebesar 50 Milyar rupiah.

SK Direksi No. 44E/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Batas Kewenangan Dalam Penetapan dan Pemutusan Uang Pinjaman, ditetapkan anggota-anggota Komite Pemutus Kredit serta ditetapkan batas-batas wewenang masing-masing atas besaran uang pinjaman yang dapat diputuskan.

Secara umum pelaksanaan Gadai Efek sebagai berikut :

No	Uraian	Unit Gadai efek
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	Minimal 1 hari
3	Tarif Sewa Modal	Harian, minimal 15 hari
4	Biaya Administrasi	0,125% per jangka waktu 90 hari
5	Biaya Lainnya	Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Saham dalam LQ 45, per transaksi paling banyak 5 Jenis Saham
7	Plafon Pinjaman	Minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 150 juta dihitung paling banyak 57% dari harga pasar saham (harga pasar sehari sebelumnya)
8	Nasabah	Institusi atau perorangan
9	Jangka Waktu Kredit	90 hari
10	Top Up Call	70%
11	Eksekusi	80%

Berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Usaha No.91/Lb.1.00/2008 tanggal 2 Desember 2008 penyaluran kredit gadai efek dihentikan sampai dengan adanya keputusan Direksi lebih lanjut.

KUCICA

Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA) adalah jasa pengiriman uang, bekerjasama dengan Western Union, perusahaan yang mempunyai jaringan luas, yang berkedudukan di Kanada. SE.54/UL.2.00.22.2/2007, tanggal 11 Oktober 2007, tentang Pelaksanaan Jasa Pengiriman Uang di Kantor Cabang Perum Pegadaian, menetapkan dimulainya operasi Jasa Kucica serta berlakunya Pedoman Operasional Kucica.

ARRUM

Berdasarkan SK. Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO Arrum dan No. 03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Batas Minimum dan Maksimum nilai pembiayaan ARRUM, menyatakan mulai beroperasinya jasa kredit Arrum dengan jaminan fidusia, maksimum Uang Pinjaman Rp 50 juta dengan masa kredit maksimum 36 bulan. Pasarnya adalah para pengusaha mikro yang menginginkan dasar syariah. Biaya Administrasi Arrum adalah sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
 (Dalam Rupiah Penuh)

No	Jenis Barang Jaminan	Biaya ADM
1	Sepeda Motor/Scooter	70.000
2	Mobil	200.000

Sedangkan tarif Ijarah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ijarah} = \frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp 100.000}} \times \text{Rp 700} \times \text{Jangka Waktu (Bulan)}$$

MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 54/LB.1.00/2008 tentang Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi tanggal 25 September 2008, produk yang disebut MULIA ini diluncurkan dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 28 Oktober 2008. Pembiayaan MULIA adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Emas Batangan yang dibiayai oleh pembiayaan MULIA adalah emas batangan bersertifikat internasional (LBMA-London Bullion Market Association) dengan jenis/varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram.

Pembiayaan murabahah ini mengenakan marjin atas setiap transaksi berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Marjin atas transaksi pembiayaan murabahah tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 16/US.100/2009 perihal jangka waktu, uang muka dan marjin pembiayaan MULIA. Berikut penetapan Marjin Pembiayaan MULIA :

Jangka Waktu	Uang Muka	Marjin
1 bulan	> = 20% - 100%	3,00%
	> = 25% - 30%	3,50%
3 bulan	> 30% - 40%	3,25%
	> 40% - 50%	3,25%
	> 50% - 60%	3,00%
	> 60% - 70%	3,00%
	> 70% - 80%	2,90%
	> 80% - 90%	2,80%
	> 90% - 100%	2,50%
	> = 25% - 30%	6,00%
6 bulan	> 30% - 40%	5,90%
	> 40% - 50%	5,80%
	> 50% - 60%	5,70%
	> 60% - 70%	5,60%
	> 70% - 80%	5,50%
	> 80% - 90%	5,00%
	> 90% - 100%	4,00%
	> = 30% - 40%	12,00%
12 bulan	> 40% - 50%	11,50%
	> 50% - 60%	11,00%
	> 60% - 70%	10,50%
	> 70% - 80%	10,00%
	> 80% - 90%	8,50%
	> 90% - 100%	7,00%
18 bulan	> 35% - 40%	18,00%
	> 40% - 50%	17,00%

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Jangka Waktu	Uang Muka	Marjin
24 bulan	> 50% - 60%	16,00%
	> 60% - 70%	15,00%
	> 70% - 80%	13,50%
	> 80% - 90%	11,00%
	> 90% - 100%	7,00%
	> 40% - 50%	22,00%
	> 50% - 60%	20,50%
	> 60% - 70%	18,50%
	> 70% - 80%	16,00%
	> 80% - 90%	12,50%
36 bulan	> 90% - 100%	7,80%
	> 45% - 50%	29,00%
	> 50% - 60%	28,50%
	> 60% - 70%	24,00%
	> 70% - 80%	20,00%
	> 80% - 90%	15,00%
	> 90% - 100%	8,60%

Atas transaksi pelunasan pembiayaan MULIA dipercepat maka Direksi Pegadaian menetapkan Prosentase Potongan Margin MULIA yang diatur dalam Surat Edaran No. 73/Lb.1.00/2008 perihal Potongan Marjin MULIA. Berikut Tabel Potongan Marjin MULIA:

Bulan Ke	Prosentase Potongan Marjin Mulia (dalam %)				
	Jangka Waktu Pembiayaan				
	6	12	18	24	36
1	50,00	75,00	83,00	87,50	91,66
2	40,00	68,19	78,12	83,70	89,04
3	30,00	61,38	73,24	79,90	86,42
4	20,00	54,57	68,36	76,10	83,80
5	10,00	47,76	63,48	72,30	81,18
6	00,00	40,95	58,60	68,50	78,56
7	--	34,14	53,72	65,70	75,94
8	--	27,33	48,84	60,90	73,32
9	--	20,52	43,96	57,10	70,70
10	--	13,71	39,08	53,30	68,08
11	--	6,90	34,20	49,50	65,46
12	--	0,00	29,32	45,70	62,84
13	--	--	24,44	41,90	60,22
14	--	--	19,56	38,10	57,60
15	--	--	14,68	34,30	54,98
16	--	--	9,80	30,50	52,36
17	--	--	4,92	26,70	49,74
18	--	--	0,00	22,90	47,12
19	--	--	--	19,10	44,50
20	--	--	--	15,30	41,88
21	--	--	--	11,50	39,26
22	--	--	--	7,70	36,64
23	--	--	--	3,90	34,02
24	--	--	--	0,00	31,40
25	--	--	--	--	28,78
26	--	--	--	--	26,16

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah Penuh)

Bulan Ke	Prosentase Potongan Marjin Mulia (dalam %)				
	Jangka Waktu Pembiayaan				
	6	12	18	24	36
27	--	--	--	--	23,54
28	--	--	--	--	20,92
29	--	--	--	--	18,30
30	--	--	--	--	15,68
31	--	--	--	--	13,06
32	--	--	--	--	10,44
33	--	--	--	--	7,82
34	--	--	--	--	5,20
35	--	--	--	--	2,58
36	--	--	--	--	0,00

2.e. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Pegawai

Pinjaman Gadai yang bermasalah adalah PYD yang barang jaminannya dijadikan sebagai barang bukti perkara oleh pihak berwajib sampai ada keputusan dari Pengadilan. Nilai yang diakui sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebesar uang pinjaman yang tercatat dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan dibukukan pada saat barang jaminan diambil oleh pihak berwajib untuk dijadikan sebagai barang bukti perkara di Pengadilan.

Pinjaman fidusia bermasalah adalah pinjaman yang mengalami tunggakan lebih dari 3 bulan tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat diklaim ke pihak asuradur. Dalam hal ini penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk dan akan dipulihkan kemudian setelah Perusahaan berhasil mengeksekusi jaminan fidusia terkait.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pegawai merupakan penyisihan atas piutang TGR kepada karyawan yang sudah mendapatkan SK pembebanan Direksi (tidak termasuk didalamnya Kerugian Perusahaan yang Diperhitungkan (KPYD/K4TGR).

2.f. Persediaan

Persediaan emas dinilai berdasarkan harga perolehan dan harga pasar.

Persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan dan dicatat sebagai beban pada saat digunakan.

2.g. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seluruh aset tetap disusutkan, kecuali tanah. Aset tetap selain bangunan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double declining method*), sedangkan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan Permanen	20
Bangunan Tidak Permanen	10
Inventaris	4
Kendaraan Bermotor Roda Dua	4
Kendaraan Bermotor Roda Empat	8

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya pemugaran dalam jumlah besar yang sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian (ADP) merupakan akumulasi biaya material dan biaya lainnya yang terkait dengan aset dalam penyelesaian tersebut. Pada saat aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap untuk digunakan, maka aset dalam penyelesaian dialihkan ke akun aset tetap yang sesuai.

Aset Tetap Yang Dikelola Pihak Lain Dalam Rangka Kerja Sama Operasi (KSO)

Tanah yang diserahkan oleh Perusahaan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dicatat sebagai Aset KSO dalam kelompok Aset Lain-lain sebesar biaya perolehannya. Aset yang dibangun oleh Mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan Mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

Perusahaan mencatat pengalihan Aset yang dibangun oleh mitra KSO sebagai Aset tetap dengan mengkredit pendapatan pengalihan Aset KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deffered income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut.

2.h. Beban Ditangguhkan

Beban ditangguhkan adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu:

- Beban rehabilitasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.
- Beban pengurusan legal hak atas tanah, diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah tersebut. Jenis atas tanah ini adalah hak guna bangunan yang mempunyai masa manfaat selama 20 tahun.
- Biaya RUF (*Revolving Underwriter Facility*) adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman sindikasi seperti biaya arranger, komitmen bank dan konsultan hukum/notaris, diamortisasi sepanjang jangka waktu fasilitas pinjaman RUF yaitu lima tahun.

2.i. Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP)

Peraturan mengenai lelang barang jaminan dan pengelolaan Barang Sisa Lelang (BSL) berlaku ketentuan Surat Edaran Direksi No.48/OP.1.00211/2003 dan No.49/OP.1.00211/2003 tanggal 17 Nopember 2003 yang selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi No.44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Barang jaminan yang tidak laku dijual / lelang dibukukan sebagai Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP). BLP adalah barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo (barang kasep) dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh perusahaan sebesar Harga Limit Lelang (HLL).

BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang Penjual/Pembeli 2% + Uang Miskin 0,7%. Bea Lelang dan Uang Miskin dihitung dari harga yang terbentuk pada saat lelang, yang kemudian disetor ke Kas Negara. Selanjutnya sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.40/PMK.07 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah ditetapkan / diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2006 dan Surat Edaran Direksi No. 44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006 setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin 0% atau dengan kata lain lelang tidak dikenakan uang miskin, dengan demikian untuk selanjutnya BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang Penjual/Pembeli 2%.

BLP harus terjual dan penjualan dilakukan oleh Panitia Penjualan BLP. Pelaksanaan Penjualan dapat dilakukan oleh Kantor Cabang yang mempunyai harga pasar tertinggi dengan cara di bawah tangan atau dimutasi ke Cabang lain dan dapat dijual dengan cepat.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Harga penjualan ditetapkan sebagai berikut:

- BLP perhiasan emas, harga penjualannya tergantung pada harga yang tertinggi antara harga pasar pusat untuk lelang (HPPL) dan harga pasar daerah untuk lelang (HPPDL)
- BLP non emas, penjualannya ditetapkan minimal sebesar harga pembelian (H.Pb.BLP). Penjualan di bawah harga pembelian (H.Pb) harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Wilayah.

Penjualan BLP di bawah tangan adalah penjualan BLP yang dilakukan secara langsung tanpa melalui proses lelang, apabila di cabang bersangkutan tidak ada calon pembeli, BLP akan dikirim ke cabang lain dengan prosedur yang sama dengan maksud agar memperoleh harga yang paling menguntungkan.

Penjualan BLP diakui pada saat terjadinya pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli, jika hasil penjualan BLP lebih tinggi/(rendah) dari harga perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai laba/(rugi) untuk periode berjalan dan dibukukan pada pendapatan/beban lainnya.

2.j. Penyelesaian PYD Bermasalah

PYD bermasalah adalah pinjaman yang diketahui barang jaminannya ternyata ditaksir terlalu tinggi atau barang jaminannya berupa barang palsu. Setelah diketahui terjadinya kasus ini, maka Pimpinan Wilayah yang bersangkutan membentuk tim yang bertugas melakukan taksasi ulang agar dapat ditentukan nilai pasar wajar yang sebenarnya dari barang jaminan tersebut.

Berdasarkan nilai barang jaminan yang telah ditaksasi ulang, dilakukan pemindahan saldo dari akun PYD ke akun Aktiva Yang Disisihkan (AYD). Adapun potensi kerugian yang terjadi yaitu sebesar selisih antara nilai Uang Pinjaman (UP) yang Diberikan beserta Sewa Modal (SM) terhadap nilai hasil taksasi akan diproses sebagai beban kepada pegawai yang bertindak sebagai pelaku dalam kasus ini. Sementara menunggu selesainya proses penetapan tuntutan ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan jumlah potensi kerugian direklasifikasi dari PYD ke pos Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR).

KPYD adalah kerugian yang ditetapkan sementara akibat taksiran tinggi yang dilakukan oleh pegawai/pelaku tindak kecurangan. Nilai KPYD ditetapkan sebesar Uang Pinjaman + Sewa Modal – Nilai Barang Jaminan Yang Disisihkan. Atas Kerugian Pinjaman YMH Diperhitungkan tidak dilakukan pencadangan karena nilai KPYD akan direklas ke Piutang atas nama pegawai terkait sesuai dengan SK Direksi sehingga resiko kerugian relatif kecil.

Sesuai ketentuan yang berlaku, AYD harus segera dijual dan apabila hasil penjualannya ternyata melebihi nilai taksasi, maka laba atas penjualan AYD tersebut akan mengurangi angka KPYD/K4TGR.

Terhadap AYD, manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian, karena AYD sudah dinyatakan dengan nilai pasar wajarnya.

Setelah dilakukan penetapan ganti rugi, maka selanjutnya saldo Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR) akan dipindahkan ke akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Penyelesaian atas piutang TGR selanjutnya dilakukan melalui pemotongan gaji tiap bulan.

2.k. Pinjaman Revolving Underwriting Facility (RUF)

Pinjaman RUF merupakan fasilitas pinjaman secara *revolving* yang diberikan oleh para Bank Fasilitas RUF kepada debitur berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Hutang RUF dicatat sebesar pokok pinjaman, sedangkan beban bunga yang terhutang pada tanggal neraca, dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar, sedangkan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan fasilitas pinjaman sindikasi dengan jangka waktu dicatat sebagai Beban RUF ditanggungkan.

2.l. Pinjaman Obligasi

Pinjaman Obligasi adalah hutang Perusahaan yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Hutang obligasi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Pinjaman Obligasi yang akan jatuh tempo pembayarannya dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, direklasifikasi menjadi kelompok kewajiban lancar.

2.m. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi tersebut. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang harus diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode garis lurus. Amortisasi atas diskonto atau premium dicatat pada akun Beban Bunga dan Provisi.

2.n. Kewajiban Estimasi Untuk Imbalan Kerja

Imbalan kerja yang diberikan Perusahaan meliputi:

- (1) Pensiun
- (2) Pesangon
- (3) Cuti Besar

Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pegadaian. Pendanaan atas program ini diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai sebesar 4,75% per bulan dan kontribusi dari Perusahaan sebagai pemberi kerja sebesar 11,75% dari gaji pokok pegawai. Peraturan Dana Pensiun Pegadaian diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. Kp.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 dan No. Kp.2/8/50 tanggal 5 April 1999 dan peraturan ini telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan surat keputusan No. 336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Pesangon

Perusahaan juga memberikan imbalan berupa jumlah *lumpsum* yang diberikan kepada pegawai tetap yang memasuki usia pensiun. Jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan. Peraturan tentang Uang Pesangon Persiapan Pensiun Pegawai (UP4) diatur dalam Peraturan Direksi Perum Pegadaian No.1817/Kp300325/2000 tanggal 6 Juni 2000, dan Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK) dan Surat Direksi No. 6393/SDM.300323/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penjelasan atas SK Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009.

Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tidak tetap. Ketentuan hak dan besarnya Uang Cuti Besar diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 12/SDM.300323/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan pada tahun 2010 diubah melalui Surat Keputusan Direksi No. 3871/SDM.300323/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang cuti pegawai, dan melalui Surat Edaran No. 87/SDM.300323/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Amandemen/Perubahan terhadap Peraturan Cuti Pegawai.

Perusahaan menerapkan PSAK 24 Revisi 2004 untuk mengestimasi beban dan kewajiban yang timbul dari penyelenggaraan kedua program tersebut. Perhitungan estimasi beban dan kewajiban tersebut menggunakan jasa aktuaris independen. Adapun kebijakan akuntansi yang dianut adalah sebagai berikut:

- (1) metode aktuarial yang dipergunakan : **Projected Unit Credit**
- (2) kewajiban imbalan kerja adalah nilai tunai kewajiban manfaat pensiun dan pesangon dikurangi nilai wajar aktiva program, serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

- yang belum diakui.
- (3) pengakuan biaya imbalan kerja meliputi biaya jasa kini, biaya bunga, imbalan hasil asset program, keuntungan/kerugian aktuarial, biaya jasa lalu.
 - (4) keuntungan dan kerugian aktuarial yang dibebankan adalah jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program.
 - (5) tarif diskonto : mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berjangka panjang,
 - (6) tarif kenaikan gaji : mengacu pada rata-rata kenaikan berkala gaji pokok terkini,
 - (7) usia pensiun : 56 tahun.

Dengan menggunakan acuan kebijakan akuntansi yang sama, Perusahaan juga mengevaluasi kecukupan imbalan jangka panjang yang diberikannya dengan ketentuan imbalan minimum yang wajib diberikan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 "Ketenagakerjaan" pasal 156 dan pasal 167. Apabila nilai imbalan dari kedua program tersebut, kurang dari ketentuan perundang-undangan tersebut, maka selisihnya akan dicatat dan dilaporkan sebagai tambahan beban dan kewajiban imbalan jangka panjang menurut undang-undang.

2.o. Aset dan Kewajiban Keuangan

Pada tahun 2006, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Kedua pernyataan ini menggantikan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". Kedua pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.

Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) "Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Pengakuan dan Pengukuran", Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan kewajiban keuangan, sebagai berikut:

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- (1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan aset keuangan yang ditetapkan, diakui dalam "keuntungan/kerugian dalam Laporan Laba/Rugi".

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diperdagangkan.

- (2) Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai tenor diatas 1 (satu) tahun, yaitu : pinjaman Kreasi, Krasida, Krista dan Kresna.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

- (3) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:
- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
 - investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
 - investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.
- Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.

- (4) Aset keuangan tersedia untuk dijual
- Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya diakui di saldo laba diakui pada laporan laba rugi. Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Pencatatan transaksi aset keuangan dicatat dengan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak reguler.

Kewajiban Keuangan

- (1) Kewajiban keuangan dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu :
- Nilai wajar kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah kewajiban keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan kewajiban keuangan yang ditetapkan diakui dalam "keuntungan/kerugian" dalam Laporan Laba/Rugi.

Tidak ada kewajiban keuangan yang diklasifikasi sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

- (2) Kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi terdiri dari hutang bank dan hutang obligasi yang mempunyai tenor diatas 1 (satu) tahun.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menentukan secara individual jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual, maka perhitungan penurunan nilai dengan menggunakan metode *discounted cash flow* dan/atau nilai wajar jaminan.

Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai, maka Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Perhitungan secara kolektif dilakukan dengan prosentase tertentu. Setiap tahun Perusahaan akan mengkaji basis prosentase tersebut sampai dengan diperoleh data historis yang memadai.

Dampak atas penurunan nilai yang terjadi sebelum penerapan dibebankan pada tahun berjalan karena pemisahan atas dampak tersebut tidak dapat dilakukan oleh Perusahaan dan tidak praktis.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca. Nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*). Sedangkan untuk kewajiban keuangan menggunakan harga jual (*offer price*).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Perusahaan menggunakan metode *discounted cashflows* dengan menggunakan asumsi-asumsi yang berdasarkan kondisi pasar yang ada pada saat tanggal neraca untuk menentukan nilai wajar dari instrument keuangan lainnya.

2.p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan sewa modal usaha gadai dan jasa simpan syariah diakui dengan menggunakan metode akrual.
- Pendapatan sewa modal atas pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual.
- Pendapatan administrasi pinjaman dan marhun bih diakui pada saat transaksi terjadi yang dibebankan langsung kepada nasabah pada saat penyaluran pinjaman atau marhun bih, kecuali pendapatan administrasi atas kredit fidusia yang mempunyai tenor lebih dari 1 (satu) tahun yaitu diakui sebagai pendapatan unamortisasi dan diamortisasi sesuai masa tenor dengan menggunakan tarif efektif.
- Pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan yang ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan periode sewa dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

2.q. Pajak Penghasilan

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Seluruh perbedaan waktu antara jumlah tercatat aset dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*). Besarnya Pajak tangguhan ditentukan dengan tarif pajak yang berlaku.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2.r. Penggunaan Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 42 dan 43, penggunaan laba Perusahaan Umum (Perum) ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 Bab III Pasal 59 dan 60, penggunaan laba Perum Pegadaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai berikut:

Pasal 59

- Setiap tahun buku, Perum Pegadaian wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan wajar lainnya.
- 45% dari sisa penyisihan laba bersih dipakai untuk cadangan umum sampai mencapai sekurang-kurangnya dua kali lipat dari modal yang ditempatkan, dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan/sumbangan ganti rugi.
- Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 60

- Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana tersebut dalam pasal 59, disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.
- Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara, wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara BUMN dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-362/MBU/2010 tanggal 24 Juni 2010 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian tahun buku 2009.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-383/MBU/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian Tahun Buku 2009

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Pembagian laba ditetapkan sebagai berikut:

	No.S-362 / MBU/2009	No.S-383 / MBU/2009
a. Dividen	50,00%	--
b. Cadangan Tujuan	17,82%	14,62%
c. Cadangan Umum	29,18%	53,38%
d. Program Kemitraan	2,00%	1,00%
f. Program Mitra Bina Lingkungan	1,00%	1,00%
g. Dana Pembangunan Semesta	--	30,00%
	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

Mengacu pada PSAK 24 (Revisi 2004), Manajemen mencatat pembagian jasa produksi dan tantiem sebagai beban pada tahun yang bersangkutan, dan bukan sebagai distribusi laba.

2.s. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

2.t. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Oleh karena adanya ketidakpastian dalam membuat estimasi tersebut, hasil aktual yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. Kas Dan Bank

	2010 Rp	2009 Rp
Kas	<u>229.096.974.634</u>	<u>168.498.282.683</u>
Bank		
PT BRI (Persero) Tbk	86.959.080.259	66.044.290.696
PT Bank Central Asia Tbk	9.379.121.716	7.454.436.789
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.328.254.807	11.649.708.996
PT Bank Syariah Mandiri	8.694.416.296	4.121.632.063
PT BNI 46 (Persero) Tbk	7.459.706.843	4.175.515.093
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	2.030.400.916	1.477.956.033
PT Bank Bukopin Tbk	341.472.902	428.821.433
PT Bank CIMB Niaga Tbk	176.697.855	3.608.106.603
PT Bank Permata Tbk	452.344	--
PT Bank Danamon Tbk	206.196	68.397.975
Bank Lainnya di Daerah	3.605.539.513	461.353.600
Sub Jumlah	<u>127.975.349.647</u>	<u>99.490.219.281</u>
Jumlah	<u><u>357.072.324.281</u></u>	<u><u>267.988.501.964</u></u>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Seluruh kas dan bank tersebut diatas, tidak dibatasi penggunaannya dan tidak ada simpanan yang ditempatkan pada Bank yang memiliki hubungan istimewa dengan Perusahaan serta dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah.

Seluruh kas tunai (*cash in safe*) dan kas dalam perjalanan (*cash in transit*) telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat perampokan, penodongan dan kehilangan dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

- Kas Tunai (*Cash In Safe*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 200.000.000 per lokasi per tahun dan Rp 52.675.629.715 total agregat per tahun.
- Kas Dalam Perjalanan (*Cash In Transit*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 200.000.000 per lokasi per tahun dan Rp 52.675.629.715 per total agregat per tahun.

Selain itu Perusahaan telah mengasuransikan seluruh dana kas termasuk barang jaminan, aset dan barang inventaris Perusahaan yang berada di seluruh kantor Perum Pegadaian dan tempat lain kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat penggelapan/kecurangan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawan Perum Pegadaian (*fidelity guarantee/standard* Jasindo) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 500.000.000 setiap kejadian/karyawan/lokasi maksimum Rp 2.500.000.000 per tahun.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

4. Pinjaman Yang Diberikan (PYD)

Merupakan saldo pinjaman yang diberikan kepada nasabah (semuanya dalam mata uang Rupiah) per 31 Desember 2010 dan 2009 yang belum jatuh tempo dan diklasifikasikan berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut:

	2010 Rp	2009 Rp
Usaha Gadai		
Golongan A	27.231.216.900	34.056.455.787
Golongan B	611.401.067.400	609.044.976.641
Golongan C	12.579.897.238.400	9.961.149.220.425
Golongan D	1.768.426.789.500	1.248.804.996.900
Sub Jumlah	14.986.956.312.200	11.853.055.649.753
Usaha Gadai Syariah		
Marhun Bih Golongan A	806.880.500	628.494.500
Marhun Bih Golongan B	27.650.808.500	19.679.613.577
Marhun Bih Golongan C	985.269.780.800	609.297.238.289
Marhun Bih Golongan D	183.588.602.000	77.216.568.450
Sub Jumlah	1.197.316.071.800	706.821.914.816
Usaha Lain		
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	1.667.847.610.004	1.387.412.962.080
Kresna	180.284.073.891	142.389.462.248
Kredit Ar-Rum	68.825.988.000	29.826.947.472
Mulia	25.303.942.085	7.655.875.853
KUCICA	6.553.489.535	1.630.133.549
Kredit Tunda Jual Gabah	421.676.000	452.930.000
Gadai Efek	97.400.000	65.386.166.552
Sub Jumlah	1.949.334.179.515	1.634.754.477.754
Jumlah Nilai Nominal	18.133.606.563.515	14.194.632.042.323

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

	2010 Rp	2009 Rp
Pendapatan / Biaya yang Belum di Amortisasi		
Pendapatan / (Biaya) Unamortisasi PYD Kreasi	43.760.597.612	--
Pendapatan / (Biaya) Unamortisasi PYD Krasida	2.868.317.452	--
Pendapatan / (Biaya) Unamortisasi PYD Kresna	9.223.302.007	--
Pendapatan / (Biaya) Unamortisasi PYD Krista	6.500.036.629	--
	<u>62.352.253.700</u>	<u>--</u>
Jumlah PYD Bruto	<u>18.195.958.817.215</u>	<u>14.194.632.042.323</u>
Penyisihan Penurunan Nilai PYD		
Kreasi	(8.263.488.632)	--
Krasida	(175.088.031)	--
Kresna	(1.412.561.516)	--
Krista	(107.046.647.360)	--
	<u>(116.897.785.539)</u>	<u>--</u>
Jumlah PYD Bersih	<u>18.079.061.031.676</u>	<u>14.194.632.042.323</u>

Kolektibilitas Pinjaman yang Diberikan per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut:

	Tunggakan Angsuran	Umur (Hari)	2010 Rp	2009 Rp
<u>Lancar</u>				
PYD				
Golongan A,B,C, D dan KTJG	--	<120	14.987.377.988.200	11.853.508.579.753
Kresna	Tidak ada	--	171.963.878.496	142.389.462.248
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	Tidak ada	--	1.236.821.402.216	1.289.181.964.552
Gadai Efek	--	<90	97.400.000	65.386.166.552
Logam Mulia	--	--	25.303.942.085	7.655.875.853
KUCICA	--	--	6.553.489.535	1.630.133.549
Kredit Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	--	--	58.106.320.164	--
Marhun Bih				
Golongan A,B,C, dan D	--	<120	<u>1.197.316.071.800</u>	<u>706.821.914.816</u>
			17.683.540.492.496	14.066.574.097.323
<u>Dibawah Pengawasan Khusus (DPK)</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	Satu kali	--	5.200.657.591	--
Kresna	Satu kali	--	1.612.464.043	--
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	Satu kali	--	<u>138.390.362.226</u>	<u>--</u>
			145.203.483.860	--
<u>Kurang Lancar (KL)</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	Dua Kali	--	2.698.061.346	--
Kresna	Dua Kali	--	686.824.200	--
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	Dua Kali	--	<u>97.208.964.625</u>	<u>75.905.403.000</u>
			100.593.850.171	75.905.403.000
<u>Diragukan (DR)</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	3 kali	--	1.660.425.063	--
Kresna	3 kali	--	262.884.200	--
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	3 kali	--	<u>28.541.976.166</u>	<u>29.970.090.000</u>
			30.465.285.429	29.970.090.000

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

	Tunggakan Angsuran	Umur (Hari)	2010 Rp	2009 Rp
<u>Macet</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)			1.160.523.836	--
Kresna			5.758.022.952	--
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	>3 kali	--	166.884.904.771	--
			<u>173.803.451.559</u>	<u>22.182.452.000</u>
			<u>18.133.606.563.515</u>	<u>14.194.632.042.323</u>

Seluruh PYD dijamin oleh barang jaminan bergerak (lebih dari 90% adalah barang jaminan emas/likuid) yang ditaksir berdasarkan nilai wajar, apabila nasabah tidak melunasi pinjaman pada tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang.

Manajemen berpendapat bahwa Barang Jaminan yang diterima atas PYD yang diberikan cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya PYD tersebut.

Untuk pemberian PYD Kreasi dan Krista telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) terhadap risiko kerugian akibat tidak tertagihnya PYD tersebut. Terhadap rekening pinjaman yang sudah diupayakan penagihannya namun sulit diselesaikan, Perusahaan dapat mengajukan klaim kepada asuradur dengan jumlah maksimum 90% dari sisa nilai pinjaman beserta bunga yang belum dibayar nasabah.

Terhadap pemberian PYD Golongan F akan dikenakan biaya notaris, akta fidusia, cek fisik kendaraan bermotor, premi asuransi dan bea materai.

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, KREASI dan KRASIDA, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian / kerusakan / kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului / tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungkan, perampokan / penodongan, RSMD dan huru-hara dengan total nilai pertanggungangan sebesar Rp 14.493.000.000.000 batas pertanggungangan per lokasi sebesar Rp 60.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun.

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, KREASI, KRASIDA dan Gadai Syariah, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Pesero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana alam dengan total nilai pertanggungangan sebesar Rp 14.493.000.000.000 batas pertanggungangan per lokasi sebesar Rp 60.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun.

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, KREASI, KRASIDA dan Gadai Syariah, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana alam dengan total nilai pertanggungangan sebesar Rp 1.007.000.000.000 batas pertanggungangan per lokasi sebesar Rp 60.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun.

Barang jaminan atas transaksi kredit Gadai Syariah, MULIA dan ARRUM, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian / kerusakan / kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului / tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungkan, perampokan / penodongan, RSMD dan huru-hara dengan total nilai pertanggungangan sebesar Rp 1.007.000.000.000 batas pertanggungangan per lokasi sebesar Rp 40.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungangan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungangan tersebut setiap akhir periode, serta

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

penyisihan yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Marhun Bih dijadikan sebagai jaminan atas Pinjaman Bank dan Pinjaman Sindikasi yang diikat secara fidusia.

5. Piutang Lainnya

	2010	2009
	Rp	Rp
Klaim Asuransi	8.872.436.264	1.411.040.482
Piutang Pegawai	4.144.918.997	3.266.404.038
Lain-lain	602.510.292	204.839.882
Jumlah	13.619.865.553	4.882.284.402

Piutang Klaim Asuransi merupakan piutang kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berkenaan dengan pengajuan klaim atas penggantian kerugian terhadap barang jaminan dan klaim atas kerugian kredit dan Syariah yang masih dalam proses terhadap barang jaminan.

Piutang Pegawai merupakan pinjaman beberapa karyawan untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang tidak mendapat penggantian asuransi kesehatan yang akan diperhitungkan pada periode berikutnya bersamaan dengan pembayaran gaji karyawan.

6. Persediaan

	2010	2009
	Rp	Rp
Persediaan Emas	16.429.198.079	1.247.746.788
Persediaan Barang	32.474.964.994	21.325.332.234
Jumlah	48.904.163.073	22.573.079.022

Saldo persediaan Emas per 31 Desember 2010 merupakan persediaan emas MULIA pada unit Pegadaian 24, sedangkan saldo persediaan per 31 Desember 2009 merupakan persediaan emas dari eks Unit usaha Toko Emas "Galeri 24" yang telah ditutup pada tahun 2005.

Persediaan barang meliputi blanko Surat Bukti Kredit (SBK), jarum uji emas, kantong, barang cetak, alat tulis kantor, perlengkapan kantor, perlengkapan komputer, prangko dan meterai.

7. Uang Muka

	2010	2009
	Rp	Rp
Uang Muka Dividen Tahun Buku 2010	120.000.000.000	--
Uang Muka Pembelian MULIA	--	7.510.570.751
Uang Muka Dinas	4.227.140.940	4.126.096.410
Uang Muka Lainnya	277.987.920	304.052.155
Jumlah Kas	124.505.128.860	11.940.719.316

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Uang muka dividen adalah pembayaran uang muka dividen berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN No. S-796/MBU/2010 perihal setoran Dividen Interim Tahun 2010, yang diperhitungkan dengan pembayaran dividen tahun 2010.

Uang muka pembelian MULIA merupakan Uang Muka Pembelian Logam Mulia ke PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Uang muka dinas merupakan uang muka kerja yang dikeluarkan di bulan Desember tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan di bulan Januari tahun berikutnya sesuai dengan Surat Edaran Direksi No.06/TR.4.00.100/2005 tanggal 21 Maret 2005.

8. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Merupakan saldo pendapatan sewa modal dan jasa simpan (ijaroh) yang masih harus diterima per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Usaha Gadai		
Sewa Modal Golongan A	916.619.967	1.192.254.405
Sewa Modal Golongan B	32.422.330.463	31.336.230.449
Sewa Modal Golongan C	701.556.139.065	543.535.702.819
Sewa Modal Golongan D	<u>75.874.825.087</u>	<u>51.722.026.806</u>
Sub Jumlah	810.769.914.582	627.786.214.479
Usaha Syariah		
Ijaroh Golongan A	26.030.996	30.847.937
Ijaroh Golongan B	1.359.782.172	981.901.804
Ijaroh Golongan C	57.422.735.382	29.928.427.092
Ijaroh Golongan D	<u>177.864.372</u>	<u>3.613.739.305</u>
Sub Jumlah	58.986.412.922	34.554.916.138
Usaha Lain		
Sewa Modal Gadai Efek	2.379.125	4.470.326
Ijaroh Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	1.083.949.589	317.151.627
Sewa Modal Kresna	3.004.374.780	4.359.705.428
Sewa Modal Kreasi, Krasida, dan Kremada	18.125.339.385	12.784.467.378
Sewa Modal Krista	9.566.474.285	4.775.736.990
Sewa Modal Lainnya	<u>206.494.888</u>	<u>19.870.920</u>
Sub Jumlah	<u>31.989.012.052</u>	<u>22.261.402.669</u>
Jumlah	<u>901.745.339.556</u>	<u>684.602.533.286</u>

Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa modal yang masih harus diterima dapat terealisasi.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

9. Beban Dibayar di Muka

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Sewa Gedung Kantor	46.687.489.030	43.107.138.994
Asuransi Dibayar Dimuka	10.711.112.049	8.290.641.866
Lain-lain	81.861.805	70.464.261
Jumlah	<u>57.480.462.884</u>	<u>51.468.245.121</u>

Sewa gedung kantor dibayar di muka merupakan pembayaran biaya sewa gedung kantor lama yang diperpanjang dan diamortisasi selama umur sewa.

Asuransi dibayar dimuka meliputi biaya asuransi barang jaminan dan aset tetap.

10. Piutang Kepada Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Piutang TGR	13.761.385.720	12.540.579.150
Piutang Lainnya	4.844.800	127.736.371
Sub Jumlah	13.766.230.520	12.668.315.521
Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai	(12.684.002.656)	(12.334.938.186)
Jumlah	<u>1.082.227.864</u>	<u>333.377.335</u>

Piutang TGR merupakan piutang kepada karyawan Perusahaan berdasarkan penetapan Direksi atas sanksi tuntutan ganti rugi akibat tindak kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Piutang lainnya merupakan kekurangan kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh manajer cabang dan pengelola kantor cabang pembantu.

Selama tahun 2010 dan 2009 manajemen membentuk tambahan penyisihan masing-masing sebesar Rp 349.064.470 dan sebesar Rp 899.478.069 berkenaan dengan piutang TGR yang sudah sulit untuk ditagih kembali karena para pegawai yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penyisihan piutang pegawai cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut. Selain mengajukan Tuntutan Ganti Rugi kepada manajer cabang/karyawan kunci, juga melakukan upaya hukum berupa tuntutan pidana/perdata atau sanksi pemecatan atau skorsing akibat kelalaian atau kesalahan dalam operasional.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Jenis Aset tetap yang dijual termasuk nilai buku dan laba rugi yang diperoleh untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

	2010 Rp	2009 Rp
Nilai Buku		
Tanah dan Bangunan	149.604.168	--
Inventaris	9.237.230	999.895
Kendaraan	--	105
Jumlah	<u>158.841.398</u>	<u>1.000.000</u>
Hasil Penjualan		
Tanah dan Bangunan	4.800.000	--
Inventaris	20.518.316	344.974.463
Kendaraan	--	239.828.937
Jumlah	<u>25.318.316</u>	<u>584.803.400</u>
Laba Penjualan		
Tanah dan Bangunan	(145.804.168)	--
Inventaris	11.281.081	343.974.568
Kendaraan	--	239.828.832
Jumlah	<u>(134.523.087)</u>	<u>583.803.400</u>

Aset Dalam Penyelesaian Bangunan yang sudah selesai dan siap untuk digunakan telah direklasifikasi menjadi Aset Tetap - Bangunan Kepemilikan Langsung pada tahun 2010 dan 2009.

Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

Per 31 Desember 2010				
No	Keterangan	Jumlah	% Terhadap Kontrak	Jadwal Selesai
1	Kanwil Bandung Renovasi rumah dinas CPP Cikudapateuh	226.058.750	84,22%	17 April 2011
3	Kanwil Jakarta X Pembangunan gedung & prasarana Tj Periuk	344.300.750	87%	30 Maret 2011
4	Kanwil Surabaya Pembangunan gedung Diklat	1.587.058.100	71,25%	27 Maret 2011
5	Pembangunan Aplikasi	2.392.500.000	30%	30 Agustus 2011
6	Lain-lain (Masing-masing dibawah 200 juta)	<u>6.992.030.473</u>		
	Jumlah	<u>11.541.948.073</u>		

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Per 31 Desember 2009

No	Keterangan	Jumlah	% Terhadap Kontrak	Jadwal Selesai
1	Pembangunan Kanwil Padang	281.134.296	71%	Mei 2010
2	Pembangunan Rumah Dinas Kanwil Pekanbaru	214.987.746	72%	Maret 2010
3	Pembangunan Kanwil Jakarta IX	308.828.296	80%	April 2010
4	Pembangunan Kanwil Makassar	359.407.700	92%	Maret 2010
5	Pembangunan Kanwil Palembang	440.009.500	60%	Agustus 2010
6	Pembangunan CPP Gorontalo Selatan	448.600.000	78%	Maret 2010
7	Pembangunan CPP Tanjung Lobar	606.179.000	87%	Maret 2010
8	Pembangunan Diklat Surabaya	915.100.200	65%	September 2010
9	Lain-lain (Masing-masing dibawah 200 juta)	2.194.664.381		
	Jumlah	5.768.911.119		

Seluruh kantor/gedung/bangunan milik sendiri atau yang disewa oleh Perusahaan dan anak perusahaan serta kantor afiliasinya yang berada di seluruh wilayah Indonesia beserta inventaris kantor yang berada didalamnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru-hara dan bencana alam dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar

Rp 350.789.412.503 dan Rp 266.000.000.000 pada tahun 2010 dan 2009.

Kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat kecelakaan, dan pencurian/kejahatan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 22.513.500.000 dan Rp 27.815.000.000 di tahun 2010 dan 2009.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi kedalam harga perolehan aset dalam penyelesaian.

12. Aset Lain-lain

	2010 Rp	2009 Rp
Beban Ditangguhkan Biaya Pembukaan Cabang Baru	68.297.064.548	29.760.947.507
Barang Jaminan Yang Disisihkan	20.655.048.177	13.743.580.363
Kerugian Perusahaan YMH Diperhitungkan (KPYD)	14.184.859.384	5.497.834.261
Barang Lelang Milik Perusahaan	5.152.521.926	11.952.437.527
Beban Hak Atas Tanah yang Ditangguhkan	4.280.741.709	4.381.990.058
Tanah Kerja Sama Operasi	1.406.071.181	1.406.071.181
Aset Lainnya	3.299.104.451	--
Jumlah	117.275.411.376	66.742.860.897

Beban ditangguhkan biaya pembukaan cabang baru adalah biaya atas sewa gedung kantor dan renovasinya, dan akan diamortisasi sebagai beban amortisasi pembukaan cabang baru selama masa sewa. Selama tahun 2010 Perusahaan terus menambah jaringan usaha dengan membuka sejumlah kantor cabang dan unit pelayanan cabang diseluruh wilayah operasi Perusahaan sehingga menyebabkan tambahan kebutuhan biaya pembukaan cabang baru.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Beban hak tanah atas yang ditangguhkan adalah biaya perolehan hak atas tanah yang diamortisasi setiap tahun selama masa manfaatnya.

Saldo Tanah Kerja Sama Operasi merupakan harga perolehan tanah yang diserahkan oleh Perusahaan Kepada Mitra KSO untuk dibangun dan dikelola sesuai dengan perjanjian yaitu KSO tanah Cimahi dan KSO Salemba.

13. Pinjaman Bank

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.931.890.157.369	4.084.713.529.077
PT BRI (Persero) Tbk	4.246.385.408.518	3.370.815.935.681
PT Bank Central Asia Tbk	2.026.810.065.749	1.715.028.104.948
PT Bank BNI (Persero) Tbk	1.480.851.937.402	--
PT Bank Permata Tbk	200.000.000.000	--
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	184.546.551.183	81.673.714.391
Jumlah	<u>13.070.484.120.221</u>	<u>9.252.231.284.097</u>

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pinjaman modal kerja pertama kali diberikan dengan plafon Rp 300.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal 21 Pebruari 2003 yang dibuat dihadapan notaris Raharti Sudjardjati, S.H. Fasilitas pinjaman dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari plafon kredit.

Pada tahun 2009, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.17 yang dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, SH, M.Kn, nilai fasilitas pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000.

Pada tahun 2009 terdapat perubahan Addendum Perjanjian Kredit I Nomor: KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 21 April 2008 Akta Perjanjian Kredit No.281 dan diganti dengan Perjanjian Kredit No.CBG.CBI.SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 nilai plafonnya menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit adalah 12 bulan sampai dengan 20 Pebruari 2010 dan tingkat bunga 13% per tahun (*reviewable*).

Pada tahun 2010 terdapat perubahan Addendum Perjanjian Kredit No.CBG.CBI/SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang telah di aktakan dengan Akta No.17 diganti dengan Perjanjian Kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 19 Pebruari 2010 dan selanjutnya diganti dengan perjanjian kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 9 April 2010 yang diaktakan dengan Akta Perjanjian Kredit No.6 nilai plafon ditingkatkan menjadi Rp 5.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit 12 bulan sampai dengan 20 Pebruari 2011 dan tingkat bunga 10,25% per tahun (*reviewable*).

Berdasarkan surat Bank Mandiri No.CBG.CB1/343/2010 tanggal 8 Desember 2010, tingkat bunga pinjaman menjadi sebagai berikut:

1. Sampai dengan baki debet sebesar Rp 4.590.940.000.000 dikenakan suku bunga sebesar 10% per tahun
2. Atas baki debet sebesar Rp 100.000.000.000 yang ditarik pada tanggal 12 Nopember 2010 dikenakan suku bunga 8,5% per tahun
3. Untuk penarikan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 200.000.000.000 akan dikenakan suku bunga 8,25% per tahun

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Suku bunga rata-rata selama tahun 2010 dan 2009 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2010	2009
KMK I	10,00%	12,45%
KMK II	8,50%	--
KMK III	8,25%	--

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Koran (R/K) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 9 Mei 2005 yang dibuat dihadapan notaris Raharti Sudjardjati SH, fasilitas pinjaman dengan plafon sebesar Rp 300.000.000.000 tersebut berbunga 13% per tahun (*reviewable*) dan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2006. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai sebesar Rp 300.000.000.000.

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 8 April 2009 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan, SH, plafon pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 3.500.000.000.000 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010. Pinjaman tersebut dijamin dengan secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai jaminan sebesar Rp 3.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebagai berikut:

1. Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) ditambah 3,25% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar atau lebih dari Rp 2.800.000.000.000
2. Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 3,50% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar Rp 2.300.000.000.000 sampai dengan Rp 2.800.000.000.000..
3. Sebesar SBI 1 (satu) bulan ditambah 3,75% per tahun. jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan kurang dari Rp 2.300.000.000.

Pada tahun 2010, plafon pinjaman dinaikkan kembali menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 30 Maret 2010, dan jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2011, yang dibuat dihadapan notaris Yatty Sriyati Suhadiwiraatmaja, SH, MM, MHum. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2010 dan 2009 atas fasilitas diatas adalah sebagai berikut :

	2010 Rp	2009 Rp
Fasilitas KMK	10,00%	9,72%

c. PT Bank Central Asia Tbk

Fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 26 Juni 2000, yang dibuat dihadapan notaris Irawati Maruki Arifin, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 50.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga 16% per tahun (*reviewable*), jatuh tempo tanggal 26 Juni 2001. Sejak tahun 2006 nilai fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000.

Pada tahun 2009, fasilitas pinjaman diperpanjang kembali sampai dengan 24 Juni 2009 dengan plafon sebesar Rp 1.800.000.000.000.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas kredit lokal dan *time loan revolving* diubah menjadi sebagai berikut:

<u>Fasilitas</u>	<u>Plafon</u>	<u>Jatuh Tempo</u>
Kredit Lokal/Local Credit	Rp 100.000.000.000	24 Juni 2010
<i>Time Loan Revolving</i>	Rp 1.200.000.000.000	24 Juni 2010

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.21 tanggal 23 Juli 2010 tentang Perubahan Kesepuluh atas Perjanjian Kredit No.21 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat dihadapan notaries Ny Erly Soehandjojo, SH, menerangkan fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut:

<u>Fasilitas</u>	<u>Plafon</u>	<u>Jatuh Tempo</u>
Kredit Lokal (Rekening Koran)	Rp 100.000.000.000	26 Juni 2011
<i>Time Loan Revolving</i>	Rp 1.500.000.000.000	26 Juni 2011

Pada tahun 2008, fasilitas pinjaman diperpanjang kembali sampai dengan 26 Juni 2009 dengan plafon sebesar Rp 1.200.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 18 Desember 2008 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas kredit lokal dan *time loan revolving* diubah menjadi sebagai berikut:

<u>Fasilitas</u>	<u>Plafon</u>	<u>Jatuh Tempo</u>
Kredit Lokal	Rp 100.000.000.000	26 Juni 2009
<i>Time Loan Revolving</i>	Rp 700.000.000.000	26 Juni 2009

2. Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit 28 tanggal 18 Desember 2008 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas *money market loan* diubah plafonnya menjadi Rp 400.000.000.000 dan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2009.

Fasilitas *Money Market Loan* dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH, di Jakarta dan telah dilakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit 33 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas *money market loan* diubah plafonnya menjadi Rp 500.000.000.000 dan jatuh tempo tanggal 24 Juni 2010.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.22 tanggal 23 Juli 2010 tentang perubahan ketujuh atas Akta Perjanjian Kredit No.7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat dihadapan dihadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo S.H. di Jakarta menerangkan bahwa Perum Pegadaian telah menerima fasilitas pinjaman berjangka *Money Market* dengan plafon Rp 500.000.000.000 dan mengubah batas waktu pemberian fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 26 Juni 2010 dan berakhir tanggal 26 Juni 2011.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2010 dan 2009 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Nama Fasilitas Pinjaman</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Kredit Lokal	10.50%	11.00%
<i>Time Loan</i>	9.50%	10.00%
<i>Money Market Loan</i>	8.25%	9.00%

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Risiko barang jaminan ditanggung oleh Perum Pegadaian karena barang jaminan milik nasabah berada/disimpan oleh Perum Pegadaian. Apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah, penanggungjawabnya adalah Perum Pegadaian dan barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian, sebagaimana diperlakukan terhadap barang jaminan nasabah usaha gadai lainnya.

d. PT Bank BNI (Persero) Tbk

Fasilitas pinjaman dari PT Bank BNI (Persero) pertama kali diperoleh pada tahun 2010, berdasarkan Akta Perjanjian No.8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 400.000.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dan suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan dai Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5%, dan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.13 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan SH disepakati penambahan plafon pinjaman menjadi sebesar Rp 2.600.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan di 4 Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5%, jatuh tempo tanggal 14 Januari 2011.

Berdasarkan surat Bank BNI No. KP5/2.4/1420/R tanggal 1 Oktober 2010 terdapat perubahan suku bunga sebagai berikut:

1. KMK sebesar Rp 1.250.000.000.000 suku bunga 9,5% per tahun
2. KMK sebesar Rp 1.750.000.000.000 suku bunga 8,5% per tahun

Suku bunga rata-rata selama tahun 2010 dan 2009 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Nama Fasilitas Pinjaman</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
KMK I (Rp 1.250 M)	9,50%	--
KMK II (Rp 1.750 M)	8,50%	--

d. PT Bank Permata Tbk

Fasilitas pinjaman (ketentuan khusus atau fasilitas Overdraft) dari PT Bank Permata Tbk pertama kali diperoleh pada tahun 2010. Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No12 tanggal 25 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., M.Kn. Fasilitas dengan plafon sebesar Rp 100.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit dengan suku bunga pinjaman sebesar 10,25% dan jatuh tempo pada tanggal 25 Pebruari 2011.

Fasilitas pinjaman *Money Market* dari PT Bank Permata Tbk pertama kali diperoleh pada tahun 2010. Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.13 tanggal 25 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, SH., M.Kn dengan plafon sebesar Rp 200.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit dan suku bunga yang berlaku ditetapkan oleh Bank yang disepakati semua pihak, dan jatuh tempo tanggal 25 Pebruari 2011.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2010 dan 2009 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Nama Fasilitas Pinjaman</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
MML I	8,50%	--
MML II	8,50%	--
MML III	8,50%	--

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

e. PT Bank Syariah Mandiri

Fasilitas pembiayaan musyarakah dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk pertama kali diterima tahun 2007 berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.20 tanggal 22 Pebruari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH, nilai fasilitas Rp 50.000.000.000 jatuh tempo tanggal 22 Pebruari 2008, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nasabah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 56% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
2. Sebesar 44% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH, nilai fasilitas dinaikan menjadi Rp 100.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Maret 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nasabah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
2. Sebesar 40% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.3 tanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH nilai fasilitas diganti menjadi Rp 200.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Desember 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 63,26% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
2. Sebesar 36,74% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank

14. Pinjaman Obligasi Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

	2010	2009
	Rp	Rp
Obligasi X Seri A	336.500.000.000	--
Obligasi IX Seri A	--	211.000.000.000
Obligasi IX Seri B	--	13.050.000.000
Obligasi IX Seri C	--	2.000.000.000
Obligasi IX Seri D	--	43.500.000.000
Diskonto Obligasi	(360.079.032)	(406.071.438)
Jumlah	336.139.920.968	269.143.928.562

- a. Obligasi X seri A dengan suku bunga tetap sebesar 12,94% per tahun. Tingkat persentase cicilan pokok dari jumlah pokok obligasi seri A yang telah akan jatuh tempo pada ulang tahun emisi ke-8 tanggal 11 Juli 2011, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 336.500.000.000.
- b. Obligasi IX tahun 2002 seri A dengan suku bunga tetap sebesar 18,25 % per tahun. Tingkat persentase cicilan pokok dari jumlah pokok obligasi seri A yang telah jatuh tempo dan dilunasi pada ulang tahun emisi ke-8 tanggal 6 Juni 2010, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 211.000.000.000.
- c. Obligasi IX tahun 2002 seri B dengan suku bunga tetap sebesar 18,25 % per tahun. Tingkat persentase cicilan pokok dari jumlah pokok obligasi seri B yang telah jatuh tempo dan dilunasi adalah sebagai berikut:
 - Pada ulang tahun emisi ke-8 tanggal 6 Juni 2010, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 13.050.000.000.
 - Pada ulang tahun emisi ke-7 tanggal 6 Juni 2009, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 8.700.000.000.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

- d. Obligasi IX tahun 2002 seri C dengan suku bunga tetap sebesar 16,50 % per tahun. Tingkat persentase cicilan pokok dari jumlah pokok obligasi seri B yang telah jatuh tempo dan dilunasi pada ulang tahun emisi ke-8 tanggal 6 Juni 2010, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 2.000.000.000.
- e. Obligasi IX tahun 2002 seri D dengan suku bunga tetap sebesar 16,50 % per tahun. Tingkat persentase cicilan pokok dari jumlah pokok obligasi IX Seri A dan seri B yang telah jatuh tempo dan dilunasi pada ulang tahun emisi ke-8 tanggal 6 Juni 2010, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 43.500.000.000

15. Pinjaman Lainnya

Pinjaman lainnya merupakan pinjaman yang diperoleh dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan plafon sebesar Rp 15.000.0000.000, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 036/PKS/YDSM/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008.

Pinjaman tersebut disediakan untuk membiayai pengembangan usaha mikro skala rumah tangga melalui penyaluran kredit KRISTA. Jangka waktu pembiayaan 5 tahun dan akan jatuh tempo bulan September 2013.

Bunga pinjaman dikenakan dengan mengacu tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 3 bulan.

Rata-rata tingkat bunga selama tahun 2010 dan 2009 adalah 7% dan 7,15%.

16. Hutang Kepada Rekanan

	2010 Rp	2009 Rp
Hutang Pengadaan Barang dan Jasa	6.603.794.824	3.677.401.659
Titipan Premi Asuransi	6.244.176.926	7.807.552.908
Hutang Angsuran <i>Recovery</i>	6.015.420.524	--
Hutang kepada Notaris dan Institusi Hukum	5.437.333.753	7.225.519.774
Hutang Titipan Angsuran Nasabah KUMK	2.302.307.760	654.242.432
Hutang Konsinyasi Persediaan MULIA	1.360.869.000	--
Hutang Lainnya	1.199.926.491	--
Jumlah	29.163.829.278	19.364.716.773

Hutang pengadaan barang dan jasa merupakan hutang kepada PT Askrindo (pihak ketiga) terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pengadaan inventaris serta pemeliharaan dan perbaikan aset tetap ditahun 2010 dan 2009 sehubungan pembukaan Unit Pelayan Cabang dan Unit Pelayanan Syariah baru.

Hutang Angsuran *Recovery* Kredit UKM kepada PT Askrindo merupakan nilai setoran nasabah yang pinjamannya telah diklaim ke asuradur.

Titipan premi asuransi kepada PT Askrindo merupakan nilai premi asuransi yang telah dibayarkan oleh nasabah kreasi dan kresta yang belum disetorkan ke PT Askrindo.

Hutang kepada notaris dan institusi hukum adalah merupakan dana titipan dari nasabah kreasi yang akan digunakan untuk pembayaran biaya pengesahan perjanjian kredit dan akte jaminan.

Tidak terdapat hutang kepada rekanan yang memiliki hubungan istimewa dengan Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

17. Hutang Kepada Nasabah

Saldo hutang nasabah per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 64.454.806.979 dan Rp 60.005.937.156 berupa uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal (bunga) dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah bersangkutan, maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh Perusahaan.

Prosedur yang dilakukan Perusahaan untuk memberitahu nasabah mengenai uang kelebihan lelang mengacu Surat Edaran Direksi Nomor 12/UI.1.00211/2006 tanggal 14 Maret 2006 adalah:

- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah tentang jadwal lelang pada saat kredit telah jatuh tempo.
- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang tidak menghadiri lelang tentang uang kelebihan lelang yang melebihi Rp 20.000 yang merupakan hak nasabah terkait.

Pengambilan uang kelebihan tersebut dengan cara menunjukkan Surat Bukti Kredit (SBK) atau bukti lain yang sah.

18. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	2010 Rp	2009 Rp
Pajak Penghasilan 28 A	39.396.710.924	39.396.710.924
Total Pajak Dibayar Dimuka	39.396.710.924	39.396.710.924

Pajak dibayar di muka per 31 Desember 2010 dan 2009 merupakan kelebihan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan 25 pada tahun 2009. Atas kelebihan ini, Perusahaan sudah mengajukan restitusi ke Dirjen Pajak. Pada tahun 2010, kantor pajak melakukan pemeriksaan pajak Perusahaan terkait dengan lebih bayar pajak badan tersebut. Sampai dengan tanggal laporan ini dibuat, Kantor Pajak belum mengeluarkan hasil pemeriksaan atas kelebihan pembayaran angsuran tersebut.

b. Hutang Pajak

	2010 Rp	2009 Rp
Pajak Penghasilan Pasal 21	14.927.616.422	10.208.274.461
Pajak Penghasilan Pasal 25	32.254.424.916	29.800.507.917
Pajak Penghasilan Pasal 29	41.488.202.003	--
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	266.719.512	304.171.985
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	29.450.000	5.117.000
Pajak Bumi dan Bangunan	18.378.568	37.610.064
PPN	193.785.414	146.591.772
Pajak Penghasilan Pasal 23	148.831.012	243.222.993
Jumlah	89.327.407.847	40.745.496.192

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Beban Pajak Kini	428.541.301.000	318.209.384.080
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	8.397.112.962	(157.831.442)
Jumlah	<u>436.938.413.962</u>	<u>318.051.552.638</u>

Taksiran laba kena pajak Perusahaan, dan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Laba Konsolidasi	1.616.726.799.654	1.116.247.071.559
(Laba)/Rugi Anak Perusahaan	180.580.332	261.129.551
Laba Komersial	<u>1.616.907.379.986</u>	<u>1.116.508.201.110</u>

Beda Temporer:

Biaya Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	116.897.785.539	--
Estimasi Beban Jasa Produksi yang Masih Harus Dibayar	29.718.020.025	29.102.530.518
Cadangan Tantiem	6.762.000.000	--
Penyusutan Aset Tetap	5.990.427.786	3.651.288.154
Beban Manfaat Karyawan	895.073.929	(12.840.632.665)
Beban Bunga yang belum diamortisasi - Obligasi	251.750.000	--
Penyisihan Piutang	72.850.882	899.478.069
Penyisihan Kerugian Klaim TGR	(826.290.840)	--
Pendapatan/Biaya yang belum diamortisasi - PYD	(62.352.253.700)	--
	<u>97.409.363.621</u>	<u>20.812.664.076</u>

Beda Tetap :

Biaya Ulang Tahun RI/Pegadaian	1.909.754.443	1.247.456.630
Biaya Pemeliharaan Perbaikan dan eksploitasi mobil Dinas	1.376.385.419	708.000.000
Biaya Jamuan dan Representasi	723.685.552	567.970.268
Biaya Lainnya/ Sumbangan	532.319.910	357.936.970
Biaya Listrik, Telpon, Rehab Rumah Dinas	74.730.693	1.402.702.065
Biaya Denda Pajak	62.314.465	9.324.728
Biaya Perawatan Inventaris Rumah Jabatan	16.945.562	13.293.904
Biaya Penyewaan Gedung Bangunan	--	214.462.384
Laba Penjualan Aktiva Tetap	(21.168.359)	(583.803.400)
Pendapatan Jasa Giro	(1.336.541.145)	(1.199.186.839)
Pendapatan Sewa Gedung	(3.489.966.147)	(3.596.936.674)
	<u>(151.539.607)</u>	<u>(858.779.964)</u>
Laba Fiskal	<u>1.714.165.204.000</u>	<u>1.136.462.085.221</u>
Laba Fiskal (Dibulatkan)	<u>1.714.165.204.000</u>	<u>1.136.462.085.000</u>
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan		
- (2010; 25% x Rp 1.714.165.204.000)	428.541.301.000	--
- (2009; 28% x Rp 1.136.462.085.000)	--	318.209.384.080
	<u>428.541.301.000</u>	<u>318.209.384.080</u>
Kredit Pajak:		
- Angsuran PPh Pasal 25	(387.053.098.997)	(357.606.095.004)
Kurang (Lebih) Bayar PPh 29	<u>41.488.202.003</u>	<u>(39.396.710.924)</u>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun 2010 dan 2009 dengan SPT PPh Badan yang disampaikan ke kantor pajak.

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat Aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak Aset dan kewajiban. Rincian Aset dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Des 2008	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi	31 Des 2009	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi	31 Des 2010
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan:					
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai					
Piutang Karyawan	4.845.616.920	(761.882.373)	4.083.734.547	(188.359.990)	3.895.374.557
Penyisihan Penurunan Nilai PYD	-	-	-	29.224.446.385	29.224.446.385
Kewajiban Imbalan Kerja	17.758.602.506	(5.112.865.577)	12.645.736.929	217.018.481	12.862.755.410
Estimasi Beban Jasa Produksi YMHD	18.308.714.178	5.313.984.682	23.622.698.860	(23.622.698.860)	-
Pendapatan/Biaya Unamortisasi PYD	-	-	-	(15.588.063.425)	(15.588.063.425)
Beban/Pendapatan Unamortisasi - Obligasi	-	-	-	62.937.500	62.937.500
Aset Tetap	1.812.788.376	718.594.712	2.531.383.088	1.497.606.947	4.028.990.034
	<u>42.725.721.980</u>	<u>157.831.442</u>	<u>42.883.553.422</u>	<u>(8.397.112.962)</u>	<u>34.486.440.460</u>
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	<u>42.725.721.980</u>	<u>157.831.442</u>	<u>42.883.553.422</u>	<u>(8.397.112.962)</u>	<u>34.486.440.460</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh aset pajak tangguhan dapat terpulihkan dalam tahun-tahun mendatang.

19. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	2010 Rp	2009 Rp
Beban Bunga Bank	21.883.757.593	15.815.409.035
Beban Bunga Obligasi	22.556.839.410	25.404.973.090
Beban Umum	21.295.905.645	16.762.534.486
Beban Pegawai	9.517.400.057	5.823.144.211
Jumlah	<u>75.253.902.705</u>	<u>63.806.060.822</u>

20. Pinjaman Obligasi - Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

	2010 Rp	2009 Rp
Nilai Nominal		
a. Obligasi X	63.500.000.000	400.000.000.000
b. Obligasi XI	500.000.000.000	500.000.000.000
c. Obligasi XII	600.000.000.000	600.000.000.000
d. Obligasi XIII	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
Sub Jumlah	<u>2.663.500.000.000</u>	<u>3.000.000.000.000</u>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

	2010 Rp	2009 Rp
Diskonto yang belum diamortisasi		
a. Obligasi X	(456.811.612)	(1.567.810.448)
b. Obligasi XI	(1.511.805.870)	(1.792.058.245)
c. Obligasi XII	(1.346.231.406)	(1.547.914.013)
d. Obligasi XIII	(2.744.444.626)	(3.531.565.692)
Sub Jumlah	<u>(6.059.293.514)</u>	<u>(8.439.348.398)</u>
Nilai Bersih		
b. Obligasi X	63.043.188.388	398.432.189.552
c. Obligasi XI	498.488.194.130	498.207.941.755
d. Obligasi XII	598.653.768.594	598.452.085.987
e. Obligasi XIII	1.497.255.555.374	1.496.468.434.308
Sub Jumlah	<u>2.657.440.706.486</u>	<u>2.991.560.651.602</u>

Rating masing-masing obligasi berdasarkan penilaian PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) terhadap Obligasi X, XI, XII, dan XIII adalah AA (*Double A; Stable Outlook*). Rating Pemantauan Obligasi Tahun 2010 AA+.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan oleh perjanjian perwaliamanatan.

Berikut adalah penjelasan rinci atas obligasi:

a. Obligasi X Tahun 2003

Obligasi X Tahun 2003 diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*) dengan rincian sebagai berikut:

	2010 Rp	2009 Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A	--	336.500.000.000
Obligasi Seri B	63.500.000.000	63.500.000.000
	<u>63.500.000.000</u>	<u>400.000.000.000</u>

Obligasi X Seri A sebesar Rp 336.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 11 Juli 2011 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,94% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi X Seri B Tahun 2004 sebesar Rp 63.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 15 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2018 dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun untuk tahun pertama sampai ketiga dan bunga mengambang untuk tahun keempat sampai dengan tahun kelimabelas yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulan ditambah premi tetap sebesar 1,00%, maksimal 15,50% dan minimal 10,50%.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi X selama tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2010	2009
Obligasi X Seri A	12,94%	12,94%
Obligasi X Seri B	10,50%	10,50%

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Penerbitan obligasi X berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.39 tanggal 12 Mei 2003 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio kewajiban terhadap ekuitas maksimal 5:1 sampai dengan 21 Juli 2008 selanjutnya maksimal 7 : 1

b. Obligasi XI Tahun 2006

Obligasi XI Tahun 2006 memiliki jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A	400.000.000.000	400.000.000.000
Obligasi Seri B	100.000.000.000	100.000.000.000
	<u><u>500.000.000.000</u></u>	<u><u>500.000.000.000</u></u>

Emisi Obligasi XI Seri A Tahun 2006 sebesar Rp 400.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat, dengan jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Emisi Obligasi XI Seri B Tahun 2006 sebesar Rp 100.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,25 % pertahun, dengan batas atas sebesar 16,00% dan batas bawah 10,00 %.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XI selama tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut

<u>Jenis Obligasi</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Obligasi XI Seri A	13,10%	13,10%
Obligasi XI Seri B	10,00%	10,00%

Penerbitan obligasi XI berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.5 tanggal 10 April 2006 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio kewajiban terhadap ekuitas maksimal 10:1

c. Obligasi XII Tahun 2007

Obligasi XII Tahun 2007 Seri A dan Seri B dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 4 September 2017 terdiri dari:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A	370.000.000.000	370.000.000.000
Obligasi Seri B	230.000.000.000	230.000.000.000
	<u><u>600.000.000.000</u></u>	<u><u>600.000.000.000</u></u>

Obligasi XII Seri A Tahun 2007 sebesar Rp 370.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi XII Seri B Tahun 2007 sebesar Rp 230.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,00% per tahun, dengan batas atas sebesar 12,00% dan batas bawah 8,00%. Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XII selama tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2010	2009
Obligasi XII Seri A	10,03%	10,03%
Obligasi XII Seri B	8,00%	8,00%

Penerbitan obligasi XII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.2 tanggal 4 Juli 2007 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio kewajiban terhadap ekuitas maksimal 10:1

- d. Obligasi XIII Tahun 2009 Seri A dengan jangka waktu 5 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2014, Seri B dengan jangka waktu 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2017, dan Seri C dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2019 terdiri dari:

	2010 Rp	2009 Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A-1	350.000.000.000	350.000.000.000
Obligasi Seri A-2	100.000.000.000	100.000.000.000
Obligasi Seri B	650.000.000.000	650.000.000.000
Obligasi Seri C	400.000.000.000	400.000.000.000
	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000

Obligasi XIII Seri A-1 tahun 2009 sebesar Rp 350.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama sampai tahun kelima.

Obligasi XIII Seri A-2 tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 3% per tahun, dengan batas atas sebesar 13% dan batas bawah 10%.

Obligasi XIII Seri B tahun 2009 sebesar Rp 650.000.000.000 dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,650% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi XIII Seri C tahun 2009 sebesar Rp 400.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XIII selama tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2010	2009
Obligasi XIII Seri A-1	11,675%	11,675%
Obligasi XIII Seri A-2	11,675%	11,675%
Obligasi XIII Seri B	12,650%	12,650%
Obligasi XIII Seri C	12,875%	12,875%

Penerbitan obligasi XIII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.24 tanggal 12 Juni 2009 dengan PT Bank Mega Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio kewajiban terhadap ekuitas maksimal 10:1

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing obligasi adalah sebagai berikut:

- Obligasi IX setiap tanggal 6 Maret, 6 Juni, 6 September dan 6 Desember
- Obligasi X Seri A setiap tanggal 11 Januari, 11 April, 11 Juni, dan 11 Oktober
- Obligasi X Seri B setiap tanggal 12 Maret, 12 Juni, 12 September, dan 12 Desember.
- Obligasi XI setiap tanggal 23 Pebruari, 23 Mei, 23 Agustus dan 23 Nopember.
- Obligasi XII setiap tanggal 4 Maret, 4 Juni, 4 September, dan 4 Desember.
- Obligasi XIII setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober.

Rincian obligasi berdasarkan jumlah bagian yang jatuh tempo yang dibagi berdasarkan tahun jatuh tempo:

Uraian	Nilai Nominal	Tahun Jatuh Tempo
Hutang Obligasi yang akan jatuh tempo	Rp	
Obligasi IX seri A (jatuh tempo ulah ke-8)	211.000.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri B (jatuh tempo ulah ke-8)	13.050.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri C (jatuh tempo ulah ke-8)	2.000.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri D (jatuh tempo ulah ke-8)	43.500.000.000	Tahun 2010
Jumlah Hutang Obligasi yang akan Jatuh Tempo	269.550.000.000	
Obligasi X seri A	336.500.000.000	Tahun 2011
Obligasi XIII seri A-1	350.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XIII seri A-2	100.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XI seri A	400.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XI seri B	100.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XII seri A	370.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XII seri B	230.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII seri B	650.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi X seri B	63.500.000.000	Tahun 2018
Obligasi XIII seri C	400.000.000.000	Tahun 2019
Jumlah Hutang Obligasi Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	3.000.000.000.000	
Jumlah Hutang Obligasi	3.269.550.000.000	

Obligasi X sebanyak 60% dari sisa pokok yang terhutang, dijamin dengan tagihan Perusahaan yang diberikan kepada nasabah (PYD), sedangkan obligasi XI, XII dan XIII tidak dijamin dengan aset PYD.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

PT Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT Bank Mega, Tbk selaku wali amanat dalam rangka penerbitan obligasi diatas, tidak memiliki tagihan terhadap Perusahaan selaku kreditor.

Dalam perjanjian Perwaliamanatan dari tiap-tiap obligasi di atas tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan Perusahaan untuk membentuk dana pelunasan obligasi (*sinking fund*).

21. Pinjaman Dari Pemerintah

	2010 Rp	2009 Rp
Pinjaman Pemerintah Pusat	410.000.000.000	410.000.000.000
Pinjaman dari Pemda Indramayu	--	600.000.000
Pinjaman dari Pemda Purbalingga	--	750.000.000
Jumlah	410.000.000.000	411.350.000.000

Pinjaman Pemerintah Pusat

Pinjaman Pemerintah Pusat merupakan Surat Utang Pemerintah (SUP) sebesar Rp 410.000.000.000 adalah pinjaman untuk Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No.S-121/MK.06/2004 tanggal 14 April 2004 dan Perjanjian Pinjaman No.KP-019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, dan diubah terakhir dengan Persetujuan Perubahan No.AMA-33/KP-019/DP3/2007 tanggal 8 Maret 2007. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2009 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Rata-rata tingkat bunga selama tahun 2010 dan 2009 adalah 6,96% per tahun dan 7,15% per tahun Bunga dibayar setiap tanggal 6 Maret, 9 Juni, 9 September dan 9 Desember tiap tahunnya.

Berdasarkan perubahan perjanjian No.AMA-52/KP-019/DSM/2009 tanggal 13 Agustus 2009, dilakukan perubahan pasal 4 ayat 4 dari PP No.KP-019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, Pemerintah menyetujui perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 10 Desember 2019.

Pinjaman dari Pemda Indramayu

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Pemda Kabupaten Indramayu tentang Pendanaan Kredit Tunda Jual Gabah Melalui Sistem Gadai di wilayah Kabupaten Indramayu No.27/TR.2.0010/III/2003 No.581/1062/Distan tanggal 5 Agustus 2003, Perusahaan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang selama 10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian sebesar Rp 600.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12% per tahun.

Selanjutnya berdasarkan Addendum No.1275/TR.200.112/XII/2004 - No.581/1459/Distan tanggal 24 Desember 2004 disebutkan bahwa selama jangka waktu perjanjian, Pihak Perusahaan dapat melunasi sebagian atau seluruh pinjaman modal kerja dan Pihak Pemda Indramayu dapat menambah atau menarik dan menempatkan kembali pinjaman modal kerja dengan persetujuan kedua belah pihak.

Perusahaan telah melunasi pinjaman ini pada tanggal 9 Maret 2010.

Pinjaman dari Pemda Purbalingga

Pinjaman dari Pemerintah Daerah Purbalingga per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 750.000.000 dan Rp 850.000.000 yang digunakan untuk Pendanaan modal kerja Kredit KRISTA, sesuai surat perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Skala Rumah Tangga Melalui Upaya Peningkatan

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Penguatan Pembiayaan No.1039/SP.300.233/XI/07 - No.538/22 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007, Perusahaan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang (jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian ini) sebesar Rp1.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun.

Perusahaan telah melunasi pinjaman ini pada bulan Nopember 2010.

22. Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan pendapatan sewa gedung yang ditangguhkan sesuai dengan umur sewa, terdiri dari:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Pendapatan Diterima Dimuka		
Sewa Gedung Ditangguhkan Yang Akan diamortisasi dalam satu tahun	1.637.488.636	1.637.488.636
Sewa Gedung Diterima Dimuka	1.083.753.862	1.982.674.380
Pendapatan Marjin Mulia	1.835.137.705	--
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	604.583.200	--
Jumlah	<u>5.160.963.403</u>	<u>3.620.163.016</u>
Pendapatan Ditangguhkan Sewa Gedung Harco (Catatan 37)		
Pendapatan Sewa Ditangguhkan	24.425.872.162	26.063.360.798
Sewa Gedung Ditangguhkan Yang Akan Diamortisasi Dalam Satu Tahun	(1.637.488.636)	(1.637.488.636)
Jumlah	<u>22.788.383.526</u>	<u>24.425.872.162</u>

23. Hutang Lancar Lainnya

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Jasa Produksi	124.208.815.464	94.490.795.439
Iuran Taspen/THT dan Askes	17.237.459.069	9.561.620.536
Hutang Tantiem	6.762.000.000	--
Hutang Pegawai	3.976.177.262	3.933.354.411
Dana Sosial dan Dana Pendidikan	2.585.094.695	2.589.219.695
Bea Lelang	882.030.338	733.847.876
Program Kemitran dan Bina Lingkungan	314.807.535	227.036.601
Hutang Subrogasi atau Recovery	148.755.969	68.610.947
Hutang Lainnya	4.059.691.516	6.564.397.524
Jumlah	<u>160.174.831.848</u>	<u>118.168.883.029</u>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

24. Kewajiban Estimasi Untuk Imbalan Kerja

	2010	2009
	Rp	Rp
Kewajiban Program Pensiun	(9.488.368.257)	31.891.137.289
Kewajiban Program Pesangon	38.546.418.514	15.112.523.038
Kewajiban Program Cuti Besar	22.392.971.383	3.579.287.384
Jumlah	51.451.021.640	50.582.947.711

a. Program Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pendanaan program pensiun ini dibentuk setiap bulan dari iuran karyawan sebesar 4,75% dan iuran yang ditanggung Perseroan sebesar 11,75% dari gaji pokok karyawan.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun Perum Pegadaian. Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi No. KP.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan No. Kep-336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Untuk karyawan yang terhitung mulai bekerja sejak tahun 2007 ke atas, maka pengelolaan dana pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank BNI (Persero) Tbk.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2010 dan 2009 adalah:

	2010	2009
	Rp	Rp
Aset Program	411.180.059.408	316.263.400.288
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat Pensiun	528.581.922.643	455.862.451.749
Defisit Pendanaan	117.401.863.235	139.599.051.461
Kewajiban Transisi yang belum diakui	--	--
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(126.890.231.492)	(107.707.914.172)
Beban Pensiun yang Masih Harus Dibayar	(9.488.368.257)	31.891.137.289

Rekonsiliasi perubahan saldo Beban Pensiun Yang Masih Harus Dibayar selama tahun 2010 dan 2009:

	2010	2009
	Rp	Rp
Saldo Awal Tahun	31.891.137.289	58.356.612.641
Beban Pensiun Tahun Berjalan	25.595.061.900	9.699.619.075
Kontribusi iuran ke Dana Pensiun	(66.974.567.446)	(36.165.094.427)
Saldo Akhir Tahun	(9.488.368.257)	31.891.137.289

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Beban yang diakui pada tahun 2010 dan 2009 terdiri dari komponen sebagai berikut:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Beban jasa kini	6.914.795.655	6.535.615.408
Beban bunga	47.865.557.433	32.528.335.771
-/- Imbal Hasil investasi	(33.207.657.030)	(29.364.332.104)
Beban amortisasi kewajiban transisi	--	--
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	4.022.365.842	--
Beban Yang Diakui	<u>25.595.061.900</u>	<u>9.699.619.075</u>

b. Program Pesangon

Penyelenggaraan Program Pesangon (UP4) didasarkan pada Peraturan Direksi No. 1817/Kp300323/2000, jo Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK). Manfaat Pesangon berupa pembayaran jumlah *lumpsum* diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2010 dan 2009 adalah:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Aset Program	--	--
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat Pesangon	305.825.433.198	268.440.550.756
Defisit Pendanaan	305.825.433.198	268.440.550.756
Kewajiban Transisi yang belum diakui	(69.038.491.815)	(74.273.920.142)
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	198.240.522.869	179.054.107.576
Beban Pesangon yang Masih Harus Dibayar	<u>38.546.418.514</u>	<u>15.112.523.038</u>

Rekonsiliasi perubahan saldo Beban Pesangon Yang Masih harus Dibayar selama tahun 2010 dan 2009 adalah:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Saldo Awal Tahun	15.112.523.038	5.066.967.735
Beban yang Dibentuk	65.342.524.877	47.994.089.361
Pesangon yang Dibayarkan	(41.908.629.401)	(37.948.534.058)
Saldo Akhir Tahun	<u>38.546.418.514</u>	<u>15.112.523.038</u>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Beban yang dibentuk selama tahun 2010 dan 2009 adalah:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Beban jasa kini	18.778.853.652	15.664.864.970
Beban bunga	28.186.257.829	9.349.593.489
Amortisasi Biaya Jasa Lalu (<i>Non Vested</i>)	5.235.428.328	5.235.428.327
Beban amortisasi kewajiban transisi Peserta 50th keatas (<i>vested</i>) dibebankan sekaligus	--	12.167.558.527
Peserta dibawah 50th (<i>diamortisasi sisa masa kerja masing masing</i>)	5.576.664.048	5.576.644.048
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	7.565.341.020	--
Beban Yang Diakui	<u>65.342.544.877</u>	<u>47.994.089.361</u>

c. Program Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tetap.

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat Cuti Besar	72.113.380.586	32.478.042.882
Defisit Pendanaan	72.113.380.586	32.478.042.882
Kewajiban Transisi yang belum diakui	(24.190.905.316)	(25.708.197.052)
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(25.529.503.887)	(3.190.558.446)
Beban Cuti Besar yang Masih Harus Dibayar	<u>22.392.971.383</u>	<u>3.579.287.384</u>

Rekonsiliasi kewajiban manfaat karyawan diestimasi yang diakui di neraca dan beban manfaat yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Saldo Awal Tahun	3.579.287.384	--
Beban Cuti Besar Tahun Berjalan	39.292.938.857	7.673.165.694
Pembayaran Cuti Besar	(20.479.254.858)	(4.093.878.310)
Saldo Akhir Tahun	<u>22.392.971.383</u>	<u>3.579.287.384</u>

Beban yang dibentuk selama tahun 2010 dan 2009 terdiri dari:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Beban Jasa Kini	8.355.731.119	3.297.197.635
Beban Bunga	3.410.194.503	2.858.676.323
Dampak Perubahan Kurtailmen dan Penyelesaian	26.009.721.499	--
Beban Amortisasi Kewajiban Transisi	1.517.291.736	1.517.291.736
Beban Yang Diakui	<u>39.292.938.857</u>	<u>7.673.165.694</u>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Asumsi Aktuarial

Per 31 Desember 2010 dan 2009, perhitungan beban dan kewajiban aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial yang tertuang dalam laporannya masing-masing No. 1855/KIS/LA/03/2011, 1856/KIS/LA/03/2011, dan 1854/KIS/LA/03/2011 tanggal 21 Maret 2011, dan No. 1688/KIS/LA/03/2009, 1689/KIS/LA/03/2009, dan 1690/KIS/LA/03/2009 tanggal 10 Maret 2010. Adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- (1) metode perhitungan yang dipergunakan : Projected Unit Credit,
- (2) tingkat bunga diskonto yang dipergunakan per 31 Desember 2010 dan 2009: 11,75% p.a dan 12% p.a;
- (3) tingkat bunga imbal hasil investasi Aset program per 31 Desember 2010 dan 2009: 10,5% dan 12% p.a.;
- (4) tingkat kenaikan gaji berkala per 31 Desember 2010 dan 2009: 7,0% per tahun dan 7% per tahun;
- (5) tabel mortalita yang dipergunakan: Tabel Mortalita Indonesia II
- (6) usia pensiun 56 tahun;
- (7) jumlah pegawai per 31 Desember 2010 dan 2009: 6.630 dan 5.884.

25. Ekuitas

Merupakan Penyertaan Pemerintah yang berasal dari kekayaan bersih pada saat pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum, Penyertaan Modal Pemerintah, Laba (Rugi) Surat Berharga Yang Belum Direalisasikan dan Saldo Laba dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Modal Awal	205.000.000.000	205.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah	46.252.000.000	46.252.000.000
	<u>251.252.000.000</u>	<u>251.252.000.000</u>
Saldo Laba		
Ditentukan Penggunaannya	1.865.162.562.133	1.490.010.668.212
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.179.788.385.692	798.195.518.921
Jumlah Ekuitas	<u>3.296.202.947.825</u>	<u>2.539.458.187.133</u>

a. Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku (Catatan 2.r) dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Saldo Awal	1.490.010.668.212	1.059.199.340.092
Penambahan:		
Cadangan Umum	232.948.893.921	338.186.328.120
Cadangan Tujuan	142.203.000.000	92.625.000.000
Jumlah Penambahan	<u>375.151.893.921</u>	<u>430.811.328.120</u>
Saldo Akhir	<u>1.865.162.562.133</u>	<u>1.490.010.668.212</u>

b. Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang pada tanggal neraca belum ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi laba belum ditentukan penggunaannya berdasarkan surat dari Kementerian BUMN (Catatan 2.r) adalah sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

	Pembagian atas Saldo Laba	
	2009	2008
	Rp	Rp
Dividen	399.097.760.000	--
Cadangan Umum	232.948.893.921	338.186.328.120
Cadangan Tujuan	142.203.000.000	92.625.000.000
Dana Program Kemitraan	15.963.910.000	6.336.000.000
Dana Bina ingkungan	7.981.955.000	6.336.000.000
Dana Pembangunan Semesta	--	190.065.000.000
Sub Jumlah	798.195.518.921	633.548.328.120
Jumlah	798.195.518.921	633.548.328.120

26. Pendapatan Sewa Modal

	2010	2009
	Rp	Rp
Sewa Modal Gadai KCA		
Sewa Modal Golongan A	5.655.479.226	7.366.591.346
Sewa Modal Golongan B	184.926.690.791	173.877.650.711
Sewa Modal Golongan C	3.624.893.808.645	2.764.540.717.744
Sewa Modal Golongan D	365.039.250.384	267.667.925.930
Sub Jumlah	4.180.515.229.046	3.213.452.885.731
Jasa Simpan/Ijarah Gadai Syariah		
Ijarah Golongan A	164.804.659	208.663.809
Ijarah Golongan B	7.660.995.683	5.411.772.698
Ijarah Golongan C	239.859.311.450	157.828.306.075
Ijarah Golongan D	48.886.446.165	19.997.931.378
Sub Jumlah	296.571.557.957	183.446.673.960
Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya		
Sewa Modal Kresna	33.220.260.383	20.035.343.551
Sewa Modal Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	358.528.056.404	167.443.638.128
Sewa Modal Kredit Tunda Jual Gabah	58.178.900	97.032.850
Sewa Modal Gadai Efek	1.827.884.950	20.077.343.029
Marjin Mulia	6.874.877.069	2.321.193.747
Ijarah Ar-Rum	9.504.224.950	2.911.435.345
Sub Jumlah	410.013.482.656	212.885.986.650
Jumlah	4.887.100.269.659	3.609.785.546.341

Tidak ada pendapatan sewa modal yang memiliki hubungan istimewa dengan Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

27. Pendapatan Administrasi

Merupakan pendapatan administrasi atas barang jaminan milik nasabah yang ditentukan berdasarkan golongan kredit, terdiri dari:

	2010	2009
	Rp	Rp
Usaha Gadai		
Golongan A	1.279.274.536	1.695.510.700
Golongan B	22.618.614.009	22.310.366.053
Golongan C	384.658.468.080	307.529.401.900
Golongan D	51.450.747.034	39.042.490.159
	460.007.103.659	370.577.768.812
Usaha Syariah		
Golongan A	28.109.500	22.572.100
Golongan B	874.032.800	992.624.950
Golongan C	17.509.324.050	11.696.382.900
Golongan D	1.543.786.150	457.879.000
	19.955.252.500	13.169.458.950
Usaha Lainnya dan Syariah	1.901.154.761	21.533.833.332
Jumlah	481.863.510.920	405.281.061.094

Pendapatan Administrasi Usaha Lain merupakan pendapatan administrasi atas Kresna, Kreasi, Krasida, Kremada, Kredit Tunda Jual Gabah, dan Kredit Gadai Efek

28. Pendapatan Usaha Lainnya

	2010	2009
	Rp	Rp
Pendapatan Saham PT BLAG	20.900.000	127.240.000
Pendapatan Jasa Pengiriman Uang	9.308.226.007	1.909.305.093
Jumlah	9.329.126.007	2.036.545.093

29. Beban Bunga dan Provisi

	2010	2009
	Rp	Rp
Bunga Bank Mandiri	470.551.218.380	491.074.950.486
Bunga Obligasi	377.295.913.763	315.565.294.117
Bunga BRI	372.672.250.257	306.250.224.036
Bunga PT Bank BCA Tbk	192.413.600.971	147.121.976.221
Bunga PT Bank BNI (Persero) Tbk	85.623.171.521	--
Bunga Provisi, Administrasi dan Pengelolaan Pinjaman	34.409.282.508	39.874.747.362
Bunga Pinjaman SUP dan Pemerintah Daerah	27.147.680.511	36.369.510.219
Bunga PT Bank Permata Tbk	13.340.625.000	--
Bunga <i>Revolving Facility</i>	--	11.622.261.336
Bunga PT Bank Bukopin Tbk	--	81.367.931
Jumlah	1.573.453.742.911	1.347.960.331.708

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

30. Beban Penyusutan Aset Tetap

Merupakan beban penyusutan bangunan, inventaris dan kendaraan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 79.859.739.674 dan Rp 52.130.492.608. (Catatan 11).

31. Beban Pegawai

Merupakan kompensasi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Risiko serta pegawai seperti gaji, upah, tunjangan dan jasa produksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1.328.788.645.238 dan Rp 1.007.927.772.767.

32. Beban Umum

	2010 Rp	2009 Rp
Beban Keamanan	154.048.627.546	90.313.680.857
Beban Perjalanan Dinas	105.920.888.704	94.496.898.783
Biaya Penyisihan Penurunan Nilai (Lihat Catatan 5)	116.897.785.539	508.484.277
Beban Jasa <i>Outsourcing</i> Pegawai	92.853.146.673	65.349.162.350
Beban Sewa	90.682.647.195	45.561.906.015
Beban Listrik, Telpon, Air dan Gas	51.822.622.647	37.845.813.782
Beban Operasional Perusahaan	36.609.802.305	42.318.123.052
Beban Cetak/Alat Tulis Kantor	33.933.383.255	26.643.372.990
Beban Kendaraan	32.730.530.464	27.718.295.891
Beban Diklat	29.969.872.554	23.836.519.918
Beban Promosi	28.086.075.919	17.776.924.060
Beban Pemeliharaan	18.799.027.038	19.388.609.533
Beban Papan Nama	17.085.654.415	16.554.220.852
Beban Asuransi	12.052.624.071	6.899.481.225
Beban Iklan	5.673.654.685	10.961.261.420
Beban Konsultan	2.495.488.717	3.453.501.177
Biaya Penyisihan Lain	2.593.809.473	899.478.069
Lainnya	13.427.285.356	10.803.917.829
Jumlah	845.682.926.556	541.329.652.080

Beban Lainnya merupakan Beban Pemasaran, Beban Pengembangan, Beban Teknologi Informasi (TI), Beban Penelitian & Pengembangan dan Beban Izin Usaha.

33. Pendapatan Sewa Gedung

Merupakan pendapatan sewa atas bangunan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 3.489.966.147 dan Rp 3.596.936.674.

Pihak-pihak yang menyewa gedung Perusahaan adalah PT Harco Indah dan perorangan atau masyarakat yang menggunakan gedung serbaguna "Langen Palikrama" serta yang menggunakan/menempati beberapa aset milik Perusahaan yang tersebar di beberapa daerah.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

34. Pendapatan Jasa Giro

Merupakan pendapatan bunga atas rekening giro bersih setelah dikurangi pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 1.336.541.145 dan Rp 1.199.186.839.

35. Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap

Pada tahun 2010, Perusahaan mengalami kerugian atas penjualan bangunan sebesar Rp 145.804.168, sedangkan untuk penjualan inventaris memperoleh laba sebesar Rp 11.281.081.

Tahun 2009 Perusahaan memperoleh laba atas penjualan tanah kosong, inventaris dan kendaraan sebesar Rp 583.803.400 (Catatan 11).

36. Pendapatan dan Beban Lainnya

	2010	2009
	Rp	Rp
a. Pendapatan Lain-lain:		
Pendapatan Denda Angsuran/Keterlambatan Kredit	30.608.485.157	17.364.928.902
Laba Penjualan BLP, BJYD dan Marhun yang disisihkan	5.867.899.756	6.266.691.595
Lain-lain	1.947.784.140	3.761.593.669
Pendapatan Selisih Perhitungan Kas	607.774.019	151.429.695
Kartu Nasabah Hilang	572.576.158	450.225.727
Pendapatan dari Kredit UKM yang <i>Recovery</i>	32.680.960	865.608.133
Jumlah	39.637.200.190	28.860.477.721
b. Beban Lain-lain:		
Rugi Penjualan BLP, BJYD, dan Marhun yang disisihkan	1.746.516.991	5.015.760.732
Rugi Pertukaran/Pengalihan Aset Tetap	22.544.128	16.214.196
Jumlah	1.769.061.119	5.031.974.928

Pendapatan denda angsuran/keterlambatan kredit merupakan pendapatan yang diterima per kas dan Perusahaan tidak menetapkan kebijakan pengakuan pendapatan denda secara akrual.

37. Perikatan Jangka Panjang

a. Perikatan Dengan PT HARCO Indah

Pada tahun 1968 Perusahaan dengan PT Harco Indah, secara bersama-sama telah menandatangani Akta Persetujuan No. 224 tanggal 30 Mei 1968 Notaris Mohamad Said Tadjoedin, SH, akta ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perjanjian Tambahan No.178, tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, SH selanjutnya dibuat "Perjanjian BOT".

Berdasarkan Perjanjian BOT tersebut, PT Harco Indah berkewajiban membangun, mengelola dan menyerahkan kepada Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2000, gedung yang berlokasi di Jl. Samanhudi Raya No.133, Jakarta Pusat dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan. Pada tanggal 27 Januari 1997 gedung tersebut terbakar, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diserahkan sebagaimana diatur dalam perjanjian BOT karena tidak dapat dioperasikan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan pasal 2 Akta Perjanjian Tambahan No.178 tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, SH, apabila terjadi kebakaran/huru-hara, maka PT Harco Indah wajib membangun kembali gedung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan PT Harco Indah mempunyai hak perpanjangan waktu hak guna penuh untuk jangka waktu selama gedung dilaksanakan perbaikan. PT Harco Indah wajib menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut pada Perusahaan pada tanggal 30 Nopember 2005 tanpa syarat dengan kondisi baik dan layak pakai serta sebelumnya telah diadakan pengecatan secara menyeluruh dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Pada tanggal 30 Nopember 2005 PT Harco Indah telah menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut kepada Perusahaan dengan kondisi baik, layak pakai dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Selanjutnya gedung HARCO Pasar Baru tersebut disewakan senilai Rp 32.749.772.728 (bersih setelah pajak) kepada PT Harco Indah untuk jangka waktu 20 tahun (terhitung sejak tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 30 Nopember 2025) sesuai dengan Surat Perjanjian yang dikukuhkan dengan Akta No.6 tanggal 17 Nopember 2005, Notaris Buniarti Tjandra, SH.

b. Perikatan Dengan PT Graha Asadhana

Pada tahun 1993, Perusahaan dengan PT Graha Asadhana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No.62/UTE/IX/93 dan No.015/GA/DIR.UM/0993 tanggal 1 September 1993 tentang Pemanfaatan Tanah Perum Pegadaian di Jl. Salemba Raya No.2, Jakarta Pusat untuk Perkantoran dan Pertokoan dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).

PT Graha Asadhana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Graha Asadhana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersil. Tanggal pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal 28 Pebruari 1995.

PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai kepada Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000 yang dibayar 50% pada saat ditandatangani perjanjian ini dan 50% lagi pada saat pembangunan dinyatakan selesai. Selama jangka waktu pengelolaan PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai sebesar Rp 140.000.000 pertahun kepada Perusahaan. Pembayaran tahun pertama paling lambat tiga bulan sebelum ulang tahun pertama pengoperasian komersial, sedangkan pembayaran tahunan berikutnya wajib dilunasi paling lambat setiap tiga bulan setelah ulang tahun berikutnya tanggal pengoperasian komersial. Akun yang mencatat penerimaan dari PT Graha Asadhana adalah Pendapatan Lain-lain.

PT Graha Asadhana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada perusahaan dalam keadaan terawat baik, lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung perkantoran dan pertokoan komersial.

c. KSO Pertokoan Komersial (Cimahi)

Pada tahun 2005, Perusahaan dengan PT Tapak Sarana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No. 397/SP.100231/2005 dan No.001/TS/PGDN/BOT/ 07/05 tanggal 07 Juli 2005 tentang Pemanfaatan Tanah Perum Pegadaian di Jl. Pasar Atas No.68, Cimahi, Jawa Barat untuk Pertokoan Komersial dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).

PT Tapak Sarana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Tapak Sarana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian. Selama masa pembangunan PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung dalam masa pembangunan

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

(construction all risk) tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara dan bencana alam lainnya.

PT Tapak Sarana wajib membayar uang kompensasi sejumlah Rp 1.558.884.000 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- Tahap pertama : 10% (sepuluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 155.888.400 dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian.
- Tahap kedua : 40% (empat puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 623.553.600 dibayarkan enam bulan setelah penandatanganan Perjanjian.
- Tahap ketiga : 50% (lima puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 779.442.000 dibayarkan lima belas bulan setelah penandatanganan Perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersial. Tanggal dimulainya pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal pertama setelah masa persiapan pengoperasian komersial gedung berakhir. Selama masa pengelolaan, PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung atas nama Perusahaan tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara, dan bencana alam lainnya dengan klausul *all risk and full covered*.

PT Tapak Sarana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada perusahaan dalam keadaan terawat baik lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung pertokoan komersial.

Perusahaan baru menerima pembayaran uang kompensasi tahap pertama (10% atau sebesar Rp 155.888.400) dan pembangunan tersebut berdasarkan Memorandum Perusahaan No.17/UL/II/2007, tanggal 29 Januari 2007 baru mencapai sekitar 33,60%. Berdasarkan hasil pembahasan antara kedua belah pihak (Perum Pegadaian dengan PT Tapak Sarana) tanggal 22 Januari 2007 dan Surat Pernyataan PT Tapak Sarana No. 0021/Dir-Bks/01/07 tanggal 23 Januari 2007, apabila sampai dengan tanggal 14 Maret 2007 PT Tapak Sarana tidak bisa membayar kekurangan uang kompensasi, maka kontrak/PKS bersedia diputus sampai dengan waktu yang ditentukan. PT Tapak Sarana tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Berkenaan dengan kegagalan PT Tapak Sarana memenuhi kewajibannya membayar kompensasi Tahap II dan III sebagaimana diuraikan di atas, Perusahaan telah mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor gugatan 52/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 27 April 2009.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat No. 52/PDT.G/2009/PN.BB tanggal 31 Agustus 2009 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa PT Tapak Sarana (Tergugat) telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama (PKS) yang telah dibuat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 2.805.991.200 (dua milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Proyek Pembangunan Pertokoan komersial dengan sistem BOT dan menyerahkan kepemilikan Bangunan Pertokoan Komersial dengan sistem BOT tersebut yang telah berdiri di Cabang Perum Pegadaian Cimahi dari Tergugat kepada Penggugat.

Atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.45/Pdt.BD/2009/PN.BB tanggal 11 September 2009.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

38. Informasi Lain-Lain

- a. Pada tanggal 16 Januari 2003 nasabah yang bernama Ny.Sena Wiradjaja, melalui Kantor Pengacara Amir Indah & Partners menggugat Perum Pegadaian. Gugatan perdata tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2003 dengan No. Perkara.14/PDT.G/2003/PN.JKT.PST tentang Gugatan Perdata Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 20.962.500.000 ditambah bunga 2% per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan Perdata tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi terhadap 32 potong barang jaminan atas nama nasabah Ny. Sena Wiradjaja yang hilang saat terjadinya pencurian di Kantor Cabang Kebayoran Baru, pada tanggal 12-13 September 1999. Nilai taksiran barang jaminan tersebut sebesar Rp 612.789.958. Pinjaman yang Diberikan (PYD) yang dijamin oleh Barang Jaminan tersebut sudah jatuh tempo, tetapi belum ditebus oleh nasabah bersangkutan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Nomor: 14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 2 Juli 2003 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I secara renteng bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp 765.897.450 (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
- Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.139/SRT.PDT.BDG2003/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2003 dan menyerahkan memori banding tanggal 17 Februari 2004 dan telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2004 No. 14/PDT.G/2003/PN/JKT.PST.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.132/PDT/2004/PT.DKI tanggal 07 Maret 2005 dengan Amar Putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 02 Juli 2003. Dengan dibatalkannya putusan PN Jakarta Pusat tersebut maka Perum Pegadaian pada pihak yang menang dalam perkara tersebut.

Berdasarkan putusan banding tersebut, Pihak Ny. Sena Widjaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perum Pegadaian selaku termohon kasasi mengajukan Kontra Memori kasasi pada tanggal 6 Oktober 2005 dan berkas permohonan tersebut telah dikirim ke Mahkamah Agung RI oleh PN Jakarta Pusat dan telah diterima dengan Nomor Register 2407 K/PDT/2005 tanggal 22 Desember 2005.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2407/K/PDT/2005 j.o. No.14/PDT.G/2003/PN.Jkt.Pst yang pemberitahuannya kepada Perusahaan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2009, permohonan kasasi yang diajukan Ny. Sena Wiradjaya telah ditolak.

- b. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2008, Perusahaan bermaksud untuk melakukan perubahan status badan hukum dari Perum menjadi Persero. Sehubungan dengan hal tersebut telah dibentuk Tim Persiapan Pemerseroan Perum Pegadaian sesuai dengan Surat Direksi No.26/SP.200.232/2008 tanggal 7 Januari 2008. Usulan perubahan bentuk badan hukum tersebut telah disampaikan ke Menteri Negara BUMN dan selanjutnya oleh Menteri BUMN telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan surat tanggal 3 April 2008 Nomor S-223/MBU/2008. Menanggapi surat tersebut,

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Menteri Keuangan sesuai dengan suratnya Nomor S-368/MK.06/2008 tanggal 23 Juli 2008 pada prinsipnya menyetujui perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Perseroan dan mengajukan agar dilakukan pembahasan bersama dengan membentuk tim terpadu antar departemen untuk melakukan kajian lebih lanjut.

Atas hasil kajian/pembahasan bersama tersebut secara prinsip perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) disetujui oleh Menteri Keuangan dengan suratnya tanggal 5 Oktober 2009 Nomor S-592/MK.06/2009 dan Menteri Negara BUMN dengan suratnya Nomor S-801/MBU/2009 tanggal 5 Nopember 2009.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2005, saat ini sedang disusun Rancangan perubahan bentuk badan hukum (RPBBH) dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). RPBBH telah dikirimkan ke Menteri Negara BUMN dengan Surat Nomor 916/SP.300233/2010 tanggal 29 Oktober 2010 memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) PP 43 tahun 2005. Ringkasan RPBBH telah diumumkan di surat kabar Media Indonesia pada tanggal 18 Nopember 2011 (sesuai ketentuan pasal 38 ayat (1) PP Nio. 43 tahun 2005) dan telah dikirimkan ke pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditor dan karyawan. Surat pemberitahuan tidak keberatan/persetujuan untuk menjadi persero dari karyawan telah diteruskan kepada Menteri BUMN dengan surat Nomor 1026/SP.300233/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan surat persetujuan untuk menjadi persero dari pihak kreditor telah dikirimkan kepada Menteri Negara BUMN dengan surat nomor 1031/SP.300233/2010 tanggal 8 Desember 2010. Sampai dengan tanggal laporan, perubahan ini masih dalam proses di Kementerian BUMN.

39. Informasi Segmen

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan geografis dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang terdiri dari:

Wilayah	Daerah Operasi	Jumlah Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
Sumatera	Pulau Sumatera	4 (empat) Kantor Wilayah yang terdiri dari 1.082 Kantor Operasional
Jawa	Pulau Jawa	5 (lima) Kantor Wilayah dengan 2.133 Kantor Operasional
Kalimantan	Pulau Kalimantan	1 (satu) Kantor Wilayah yang terdiri dari 398 Kantor Operasional
Bali & Nusa Tenggara	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	1 (satu) Kantor Wilayah yang terdiri dari 477 Kantor Operasional
Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa)	Pulau Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya	2 (dua) Kantor Wilayah yang terdiri dari 830 Kantor Operasional

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

a. *Pendapatan Usaha Menurut Wilayah*

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Sumatera	678.806.049.581	517.019.134.102
Jawa	2.631.703.005.983	1.980.369.886.302
Kalimantan	389.543.037.488	296.057.550.317
Bali & Nusa Tenggara	626.588.903.695	447.730.318.973
Sulmapa	1.051.651.909.839	775.926.262.834
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>5.378.292.906.586</u>	<u>4.017.103.152.528</u>

b. *Hasil Usaha Menurut Wilayah*

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Sumatera	168.440.425.144	130.083.490.448
Jawa	492.493.016.039	324.828.488.879
Kalimantan	158.496.245.557	115.470.294.758
Bali & Nusa Tenggara	272.512.283.452	179.533.238.637
Sulmapa	458.565.882.015	337.123.129.131
Jumlah Laba Usaha	<u>1.550.507.852.207</u>	<u>1.087.038.641.853</u>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	<u>66.218.947.447</u>	<u>29.208.429.706</u>
Laba Sebelum PPh Badan	<u>1.616.726.799.654</u>	<u>1.116.247.071.559</u>

c. *Aset Menurut Wilayah*

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Sumatera	2.639.840.962.280	1.991.892.847.238
Jawa	9.838.770.256.986	8.057.810.687.899
Kalimantan	1.429.356.386.058	1.100.776.513.822
Bali & Nusa Tenggara	2.278.369.589.677	1.709.297.858.887
Sulmapa	4.096.705.647.725	2.999.686.220.409
Jumlah Aset	<u>20.283.042.842.726</u>	<u>15.859.464.128.255</u>

d. *Aset Tetap Menurut Wilayah*

	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
- Sumatera	73.150.277.308	54.835.270.978
- Jawa	267.551.938.687	281.837.763.410
- Kalimantan	49.741.855.483	40.822.970.652
- Bali & Nusa Tenggara	47.431.764.082	38.561.227.637
- Sulmapa	70.537.900.659	55.962.987.565
Jumlah Aset Tetap	<u>508.413.736.219</u>	<u>472.020.220.242</u>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

e. *Beban Penyusutan Aset Tetap Menurut Wilayah*

	2010 Rp	2009 Rp
- Sumatera	13.713.677.707	9.922.369.744
- Jawa	40.724.539.102	26.436.420.688
- Kalimantan	4.871.797.748	4.144.483.246
- Bali & Nusa Tenggara	6.335.125.492	5.405.946.584
- Sulmapa	14.214.599.625	6.221.272.346
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	79.859.739.674	52.130.492.608

f. *Kewajiban Menurut Wilayah*

	2010 Rp	2009 Rp
- Sumatera	26.681.443.482	14.027.567.100
- Jawa	16.908.427.310.778	13.269.023.985.316
- Kalimantan	18.008.546.937	7.403.323.446
- Bali & Nusa Tenggara	13.441.026.310	8.863.964.037
- Sulmapa	20.281.567.394	20.687.101.223
Jumlah Kewajiban	16.986.839.894.901	13.320.005.941.122

40. Manajemen Risiko

Perum Pegadaian sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai menghadapi risiko sebagai berikut:

a. **Risiko Pendanaan.**

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Perusahaan menghadapi kemungkinan risiko yang terkait dengan pendanaan, yaitu kemungkinan Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek. Hal itu dapat disebabkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat bunga di pasar, dan terkait dengan struktur permodalan, sehingga kemampuan Perusahaan untuk memberikan pinjaman menjadi berkurang. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan akhirnya akan menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Perusahaan.

Risiko Pendanaan terdiri dari :

a. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Adalah kemungkinan Perum Pegadaian tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para kreditornya.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Kreditur secara bersama menarik atau tidak memperpanjang pinjaman jangka pendeknya.
- Belum adanya kreditur pengganti.
- Kinerja keuangan menurun sehingga kepercayaan investor juga menurun.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- *Current Ratio* Pegadaian 141.72%, dimana 1,76% dari total aset merupakan kas dan setara kas sedangkan 79,79% merupakan outstanding pinjaman dengan jangka waktu kredit (*cash collection*) 4 bulan, sedangkan sebagian besar utang berjangka waktu kurang dari 1 tahun.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

- Kinerja keuangan Pegadaian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan, sekalipun dalam kondisi krisis seperti yang terjadi di tahun 1998-1999.
- Terkait dengan kinerja keuangan yang baik, kepercayaan investor semakin meningkat. Hal ini terlihat dari penilaian Pefindo untuk Obligasi Perum Pegadaian mendapat rating AA+ (*double A plus; stable outlook*) klasifikasi *investment grade*.
- Telah dilakukannya portofolio sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari 6 (enam) kreditor perbankan.

b. Risiko Suku Bunga

Adalah risiko yang terjadi karena fluktuasi tingkat suku bunga di pasar sehingga akan berdampak pada kenaikan *cost of fund* maupun penurunan laba. Di samping itu, naiknya tingkat suku bunga sumber pendanaan Perusahaan, tidak dapat langsung diberlakukan kepada nasabah yang masih memiliki pinjaman sehingga mengurangi kemampuan Perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan. Risiko ini muncul apabila terjadi :

- a. Kondisi makro ekonomi tidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat.
- b. Kenaikkan *lending rate* tidak dapat segera diberlakukan dengan pertimbangan daya beli masyarakat menurun (inflasi sangat tinggi).

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan *lending rate* sepenuhnya berada di bawah kontrol manajemen.
- Penundaan kenaikan *lending rate* dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan.

	31 Desember/December 2010					
	Suku bunga mengambang/ Suku bunga tetap/				Tidak Dikenakan bunga/	Jumlah
	Floating rate		Fixed rate			
Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun			
Aset						
Kas dan Bank	127.975.349.647	--	--	--	229.096.974.634	357.072.324.281
Pinjaman yang Diberikan	--	--	16.907.507.671.547	1.171.553.360.129	--	18.079.061.031.676
Piutang Lainnya	--	--	--	--	13.619.865.553	13.619.865.553
Piutang Hubungan Istimewa	--	--	--	--	1.082.227.864	1.082.227.864
Jumlah Aset Keuangan	127.975.349.647	--	16.907.507.671.547	1.171.553.360.129	243.799.068.051	18.450.835.449.374
Kewajiban						
Pinjaman Bank	13.070.484.120.221	--	--	--	--	13.070.484.120.221
Pinjaman Obligasi	63.043.188.388	429.004.390.687	336.139.920.968	2.165.393.127.411	--	2.993.580.627.454
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	--	--	--	--	15.000.000.000
Hutang Kepada rekanan	--	--	--	--	29.163.829.278	29.163.829.278
Hutang Kepada Nasabah	--	--	--	--	64.454.806.979	64.454.806.979
Hutang Lancar Lainnya	--	--	--	--	160.174.831.848	160.174.831.848
Pinjaman dari pemerintah						
Pusat	--	--	--	410.000.000.000	--	410.000.000.000
Jumlah Kewajiban						
Keuangan	13.148.527.308.609	429.004.390.687	336.139.920.968	2.575.393.127.411	253.793.468.105	16.742.858.215.780

c. Risiko Permodalan

Adalah risiko yang muncul terkait dengan struktur permodalan atau rasio antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Munculnya risiko ini merupakan akumulasi dari risiko operasi dan risiko financial *leverage*.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Aktivitas operasional befluktuasi sehingga pendapatan yang diterima befluktuasi.
- Meningkatnya *Debt to Equity Ratio (DER)* yaitu perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas.
- Rendahnya *retained earning* dibanding ekspansi usaha.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Pertumbuhan usaha dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan rata-rata di atas 20% per tahun.
- Mengingat utang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, maka biaya bunga yang timbul berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan.

d. Risiko Pinjaman Yang Diberikan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, perusahaan menghadapi risiko kredit dalam hal terjadi salah taksir terhadap barang jaminan milik nasabah yang berakibat penetapan pinjaman melebihi nilai barang jaminan atau turunnya nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan, apabila nasabah tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- a. Kemampuan debitur/nasabah turun sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.
- b. Turunnya nilai/kualitas barang jaminan yang diagunkan, sehingga pada saat dieksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- a. Kredit gadai dijamin oleh *collateral* berupa barang yang dikuasai oleh Pegadaian.
- b. Komposisi barang yang dijamin sebesar 90% berupa emas, berlian sedangkan sisanya berupa jaminan non-emas (elektronik, kendaraan bermotor, kain, gerabah dan lain-lain)
- c. Perum Pegadaian mempunyai hak eksekusi atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya

b. Risiko Barang Jaminan

Perusahaan dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai barang jaminan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut Perusahaan berkewajiban untuk menyimpan dan memeliharanya sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan perusahaan menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

c. Risiko Persaingan

Persaingan bisnis kini semakin ketat. Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, saling berlomba mengucurkan kredit kepada masyarakat dengan berbagai keunggulan dan kemudahan. Keunggulan tersebut menyangkut keunggulan dalam bidang produk, harga, saluran distribusi maupun pelayanan. Jenis produk yang ditawarkan pun sangat bervariasi dan dengan berbagai kemudahan yang diberikan dalam memperoleh kreditnya, sehingga dapat mempengaruhi pangsa pasar perusahaan. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000 akan meningkatkan persaingan.

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko yang dihadapi Perusahaan sehubungan dengan sistem operasional, prosedur dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional Perusahaan sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan. Termasuk dalam risiko operasional ini adalah yang berdampak pada kehilangan peluang untuk menyalurkan kredit. Risiko Operasional juga mencakup kualitas sumber daya manusia terutama juru taksir sebagai ujung tombak dalam operasional Perusahaan.

e. Risiko Peraturan Pemerintah

Mengingat kegiatan usaha Perusahaan berhubungan dengan kepentingan umum, maka biasanya Pemerintah senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

peraturan-peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti bagi perusahaan apabila berpengaruh pada adanya perubahan atau penyesuaian dalam kegiatan operasional, salah satunya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000.

f. Resiko Teknologi

Merupakan resiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu membuat barang jaminan emas palsu yang sulit dideteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksir Pegadaian. Di sisi lain apabila perusahaan ingin terus mengikuti perkembangan teknologi diperlukan biaya investasi yang sangat besar.

g. Resiko Keamanan

Resiko keamanan merupakan resiko perusahaan yang dihadapi sehubungan dengan situasi keamanan yang kurang/tidak kondusif yang ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminal dengan berbagai modus operandi, di mana Pegadaian menjadi salah satu sasaran kejahatan/perampokan.

Upaya - upaya yang telah dilakukan dalam mengurangi resiko :

1. Melakukan peningkatan standar kualitas barang yang dijamin.
2. Mencari alternatif-alternatif pendanaan yang mempunyai *cost of fund* yang lebih murah dan pencarian modal kerja dari berbagai sumber dengan berbagai jangka waktu yang sebagian besar lebih lama dari jangka waktu piutang.
3. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan, sehingga tercipta tenaga kerja yang profesional, yang dapat menunjang operasi perusahaan secara optimal.
4. Melakukan restrukturisasi cabang-cabang.
5. Membangun *corporate culture* dan *corporate image* melalui pencanangan dan sosialisasi kerabat menggapai cita.
6. Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah dan seluruh asset perusahaan.
7. Mengasuransikan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah untuk Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi).
9. Menempatkan aparat keamanan (TNI dan atau Kepolisian) di Cabang PERUM Pegadaian dan meningkatkan system penyimpanan barang jaminan, antara lain : pemasangan alarm, penggunaan CCTV, teralis dan penempatan brankas/kluis.
10. Membangun kerjasama penanganan keamanan untuk daerah yang tergabung (cluster) sehingga lebih efisien.

41. Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 23 Desember 2009, IAI menerbitkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif atau setelah tanggal 1 Januari 2011, diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. PSAK 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan"
2. PSAK 2 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas"
3. PSAK 3 (Revisi 2010) "Laporan Keuangan Interim"
4. PSAK 4 (Revisi 2009) "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri"
5. PSAK 5 (Revisi 2009) "Segmen Operasi"
6. PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi"
7. PSAK 8 (Revisi 2010) "Peristiwa Setelah Tanggal Neraca"
8. PSAK 12 (Revisi 2009) "Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama"
9. PSAK 15 (Revisi 2009) "Investasi Pada Entitas Asosiasi"
10. PSAK 19 (Revisi 2010) "Aset Takberwujud"
11. PSAK 22 (Revisi 2010) "Kombinasi Bisnis"
12. PSAK 23 (Revisi 2010) "Pendapatan"

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009
(Dalam Rupiah Penuh)

13. PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
14. PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset"
15. PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"
16. PSAK 58 (Revisi 2009) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
17. ISAK 7 (Revisi 2009) "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus"
18. ISAK 9 "Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa"
19. ISAK 10 "Program Loyalitas Pelanggan"
20. ISAK 11 "Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik"
21. ISAK 12 "Pengendalian Bersama Entitas –Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer"
22. ISAK 14 "Aset Takberwujud – Biaya Situs Web"
23. ISAK 17 "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai"

Saat ini Manajemen sedang dalam mengevaluasi dampak penerapan PSAK baru tersebut.

42. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-18/MBU/2011 tanggal 31 Januari 2011, mengangkat Suwono sebagai Direktur Utama Perum Pegadaian.

43. Reklasifikasi

Beberapa akun dalam laporan tahun 2009 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2010. Rincian akun tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>Sebelum Reklasifikasi</u> Rp	<u>Setelah Reklasifikasi</u> Rp
<u>Neraca</u>		
Aset Lain-Lain:		
Aset Lainnya	386.673.000	--
Aset Tetap:		
Tanah	--	386.673.000
Persediaan:		
Inventaris	29.076.467.676	--
Aset Tetap:		
ATBD Inventaris		29.076.467.676
<u>Laporan Laba Rugi</u>		
Pendapatan Usaha:		
Uang Kelebihan Nasabah Lewat Waktu	19.283.738.489	--
Pendapatan (Beban) Lain-lain	--	19.283.738.489
Beban Umum:		
Beban Direksi	17.244.363.973	--
Beban Pegawai:		
Beban Direksi	--	17.244.363.973

44. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dari laporan keuangan konsolidasi terlampir yang diselesaikan pada tanggal 23 Maret 2011.